Mengenal Pemikiran GUS DUR

Dikumpulkan oleh :

Moh Badrus Sholeh, S.Pd.I

YPI AT-TAUHIID

Dicetak dan digandakan untuk kalangan sendiri
Oleh Yayasan Pendidikan Islam At-Tauhiid
Suco-Mumbulsari-Jember Telp. 0331-7844911
e-mail: at_tauhiid@telkom.net

PR NU DESA SUCO

MENGENAL PEMIKIRAN
GUS DUR

PR NU DESA SUCO

MENGENAL PEMIKIRAN GUS DUR

Dikumpulkan oleh :

Moh. Badrus Sholeh, S.Pd.I

Dicetak dan diGandakan untuk kalangan sendiri

oleh

PR NU Suco & YPI At-Tauhiid

Cetakan I, November 2008/ Dzulhijjah 1429 H

Yayasan Pendidikan Islam AT-Tauhiid

Jl. Timu Gudang No 02 RT 01 RW 10 Dusun Krajan

Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kab. Jember

Jawa Timur 68147

Telp. 0331-7844911, 3440025, 4029441

e-mail : at_tauhiid@telkom.net

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan hidayahnya semoga kita senantiasa berada dijalannya yang lurus dengan tetap berpegang teguh kepada ajaran-Nya. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah sang pembawa pembawa risalah yang paripurna.

Gus Dur adalah figur yang fenomenal dan kontroversial yang acapkali mengeluarkan statemen yang membikin banyak orang kebingungan dan bahkan kebakaran jenggot. Kendati suaranya sering mengundang kontroversi, tapi suara itu tak jarang malah menjadi kemudi arus perjalanan sosial, politik dan budaya ke depan. Dia memang seorang yang tak gentar menyatakan sesuatu yang diyakininya benar. Bahkan dia juga tak gentar menyatakan sesuatu yang berbeda dengan pendapat banyak orang. Jika diselisik, kebenaran itu memang seringkali tampak radikal dan mengundang kontroversi.

Pendapatnya seringkali terlihat tanpa interes politik pribadi atau kelompoknya. Ia berani berdiri di depan untuk kepentingan orang lain atau golongan lain yang diyakninya benar. Malah sering seperti berlawanan dengan suara kelompoknya sendiri. Juga bahkan ketika ia menjabat presiden, sepetinya jabatan itu tak mampu mengeremnya untuk menyatakan sesuatu. Sepertinya, ia melupakan jabatan politis yang empuk itu demi sesuatu yang diyakininya benar. Sehingga saat ia menjabat presiden, banyak orang menganggapnya aneh karena sering kali melontarkan pernyataan yang mengundang kontroversi.

Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang selalu membela hak-hak kaum minoritas dan dekat dengan berbagai kelompok lintas agama dan budaya. Kedekatanya dengan Israel membuatnya dituduh sebagai agen Israel dan ulama yang menghancurkan Islam dari dalam. Beliau sangat anti terhadap kekerasan apalagi kekerasan atas nama agama sehingga tak heran banyak tokoh dan kelompok Islam radikal yang tidak suka padanya.

Sikap Gus Dur yang sering melawan arus mengundang tanda Tanya besar bagi setiap orang, apa sebenarnya yang ada di benak Gus Dur?, apa sebenaranya misi tujuan Gus Dur. Melalui buku ini akan diketahui pandangan dan pemikiran Gus Dur, sehingga semua pihak terhindar dari prasangka dan fitnah terhadap Beliau.

Buku ini adalah kumpulan pemikiran Gus Dur yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menguak fenomena pemikiran Gus Dur yang kontroversial. Harapannya buku ini menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk mengambil ide-ide brilian Gus Dur yang dapat kita terima dan mengkaji lebih dalam pemikiran beliau yang tidak dapat dicerna. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak. Amiin.

Lengkong, 30 November 2008

Moh. Badrus Sholeh, S.Pd.I

DAFTAR ISI

BEOGRAFI GUS DUR

BIOGRAFI GUS DUR

Abdurrahman "Addakhil", demikian nama lengkapnya. Secara leksikal, "Addakhil" berarti "Sang Penakluk", sebuah nama yang diambil Wahid Hasyim, orang tuanya, dari seorang perintis Dinasti Umayyah yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol. Belakangan kata "Addakhil" tidak cukup dikenal dan diganti nama "Wahid", Abdurrahman Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berati "abang" atau "mas".

Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara yang dilahirkan di Denanyar Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Secara genetik Gus Dur adalah keturunan "darah biru". Ayahnya, K.H. Wahid Hasyim adalah putra K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU)-organisasi massa Islam terbesar di Indonesia-dan pendiri Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibundanya, Ny. Hj. Sholehah adalah putri pendiri Pesantren Denanyar Jombang, K.H. Bisri Syamsuri. Kakek dari pihak ibunya ini juga merupakan tokoh NU, yang menjadi Rais 'Aam PBNU setelah K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Dengan demikian, Gus Dur merupakan cucu dari dua ulama NU sekaligus, dan dua tokoh bangsa Indonesia.

Pada tahun 1949, ketika clash dengan pemerintahan Belanda telah berakhir, ayahnya diangkat sebagai Menteri Agama pertama, sehingga keluarga Wahid Hasyim pindah ke Jakarta. Dengan demikian suasana baru telah dimasukinya. Tamu-tamu, yang terdiri dari para tokoh-dengan berbagai bidang profesi-yang sebelumnya telah dijumpai di rumah kakeknya, terus berlanjut ketika ayahnya menjadi Menteri agama. Hal ini memberikan pengalaman tersendiri bagi seorang anak bernama Abdurrahman Wahid. Secara tidak langsung, Gus Dur juga mulai berkenalan dengan dunia politik yang didengar dari kolega ayahnya yang sering mangkal di rumahnya.

Sejak masa kanak-kanak, ibunya telah ditandai berbagai isyarat bahwa Gus Dur akan mengalami garis hidup yang berbeda dan memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab terhadap NU. Pada bulan April 1953, Gus Dur pergi bersama ayahnya mengendarai mobil ke daerah Jawa Barat untuk meresmikan madrasah baru. Di suatu tempat di sepanjang pegunungan antara Cimahi dan Bandung, mobilnya mengalami kecelakaan. Gus Dur bisa diselamatkan, akan tetapi ayahnya meninggal. Kematian ayahnya membawa pengaruh tersendiri dalam kehidupannya.

Dalam kesehariannya, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Selain itu ia juga aktif berkunjung keperpustakaan umum di Jakarta. Pada usia belasan tahun Gus Dur telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel dan buku-buku yang agak serius. Karya-karya yang dibaca oleh Gus Dur tidak hanya cerita-cerita, utamanya cerita silat dan fiksi, akan tetapi wacana tentang filsafat dan dokumen-dokumen manca negara tidak luput dari perhatianya.

Di samping membaca, tokoh satu ini senang pula bermain bola, catur dan musik. Dengan demikian, tidak heran jika Gus Dur pernah diminta untuk menjadi komentator sepak bola di televisi. Kegemaran lainnya, yang ikut juga melengkapi hobinya adalah menonton bioskop. Kegemarannya ini menimbulkan apresiasi yang mendalam dalam dunia film. Inilah sebabnya mengapa Gu Dur pada tahun 1986-1987 diangkat sebagai ketua juri Festival Film Indonesia.

Masa remaja Gus Dur sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo. Di dua tempat inilah pengembangan ilmu pengetahuan mulai meningkat. Masa berikutnya, Gus Dur tinggal di Jombang, di pesantren Tambak Beras, sampai kemudian melanjutkan studinya di Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, pamannya telah melamarkan seorang gadis untuknya, yaitu Sinta Nuriyah anak Haji Muh. Sakur. Perkawinannya dilaksanakan ketika ia berada di Mesir.

Kemudi Sosial Bapak Bangsa

Gus Dur adalah figur Bapak Bangsa yang sering melontarkan pendapat kontroversial. Bahkan ketika menjabat Presiden RI ke-4 (20 Oktober 1999-24 Juli 2001), ia tak gentar mengungkapkan sesuatu yang diyakininya benar kendati banyak orang sulit memahami dan bahkan menentangnya.

Kendati suaranya sering mengundang kontroversi, tapi suara itu tak jarang malah menjadi kemudi arus perjalanan sosial, politik dan budaya ke depan. Dia memang seorang yang tak gentar menyatakan sesuatu yang diyakininya benar. Bahkan dia juga tak gentar menyatakan sesuatu yang berbeda dengan pendapat banyak orang. Jika diselisik, kebenaran itu memang seringkali tampak radikal dan mengundang kontroversi.

Kendati pendapatnya tidak selalu benar -- untuk menyebut seringkali tidak benar menurut pandangan pihak lain -- adalah suatu hal yang sulit dibantah bahwa banyak pendapatnya yang mengarahkan arus perjalanan bangsa pada rel yang benar sesuai dengan tujuan bangsa dalam Pembukaan UUD 1945.

Pendapatnya seringkali terlihat tanpa interes politik pribadi atau kelompoknya. Ia berani berdiri di depan untuk kepentingan orang lain atau golongan lain yang diyakninya benar. Malah sering seperti berlawanan dengan suara kelompoknya sendiri. Juga bahkan ketika ia menjabat presiden, sepetinya jabatan itu tak mampu mengeremnya untuk menyatakan sesuatu. Sepertinya, ia melupakan jabatan politis yang empuk itu demi sesuatu yang diyakininya benar. Sehingga saat ia menjabat presiden, banyak orang menganggapnya aneh karena sering kali melontarkan pernyataan yang mengundang kontroversi.

Belum satu bulan menjabat presiden, ini sudah mencetuskan pendapat yang memerahkan kuping sebagian besar anggota DPR. Di hadapan sidang lembaga legislatif, yang anggotanya segaligus sebagai anggota MPR, yang baru saja memilihnya itu, Gus Dur menyebut para anggota legislatif itu seperti anak Taman Kanak-Kanak.

Tak lama kemudian, ia pun menyatakan akan membuka hubungan dagang dengan Israel, negara yang dibenci banyak orang di Indonesia. Pernyataan ini mengundang reaksi keras dari beberapa komponen Islam.

Berselang beberapa waktu, ia pun memecat beberapa anggota Kabinet Persatuan-nya, termasuk Hamzah Haz (Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan). Berbagai kebijakan dan pemecatan ini membuatnya semakin nyata jauh dari konspirasi kepentingan politik yang memungkinkan-nya terpilih menjadi presiden.

Ketika itu, pada Sidang Umum MPR 1999, Poros Tengah yang gagal menggolkan salah seorang tokohnya sendiri menjadi presiden (BJ Habibie, Amien Rais, Hamzah Haz dan Yusril Ihza Mahendra), merangkul Gus Dur untuk dapat mengalahkan Megawati Sukarno-putri.

Gus Dur, yang terkenal piawai dalam berpolitik, dengan cekatan menangkap peluang ini. Sehingga Megawati yang partainya memenangkan Pemilu akhirnya hanya mendapatkan kursi wapres. Terpilihnya Gus Dur ini, sekali lagi telah menunjukkan sosok kontroversial. Kontroversi dalam kelayakan politik demokrasi. Kontroversi mengenai kondisi pisik Gus Dur sendiri. Namun harus diakui, itulah Gus Dur, dengan kepiawian dan keunggulannya yang melebihi kapasitas banyak orang! Kalau bukan Gus Dur, hal itu sangat mustahil terjadi.

Padahal tak heran bila pada mulanya ia dianggap hanya sebagai umpan oleh sebuah konspirasi kepentingan politik. Sebab dari perolehan suara PKB dan kondisi kesehatan, Gus Dur dianggap sangat mustahil bisa menjadi presiden. Namun, dengan kepiawian Gus Dur memainkan bola yang digulirkan Poros Tengah (ketika itu merupakan koalisi partai-partai berbasis Islam minus PKB) bergandeng tangan dengan Golkar, SU-MPR menolak pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie. Hal ini secara etis memaksa BJ Habibie mengundurkan diri dari pencalonan presiden pada detik-detik terakhir.

Malam setelah penolakan pertanggungjawaban Habibie dan sebelum pagi hari pemilihan presiden, tokoh-tokoh Golkar dan Poros Tengah mengadakan pertemuan di kediaman Habibie. Mereka mencari pengganti BJ Habibie. Alternatif pertama, Akbar Tanjung selaku Ketua Umum Golkar. Kelompok Iramasuka yang dimotori AA Bramuli menolak. Lalu muncul nama Hamzah Haz, Ketua Umum PPP. Dinilai tidak kuat melawan Megawati. Terakhir, menjelang subuh muncul nama Amien Rais, Ketua Umum PAN.

Diperkirakan Amien dapat memenangkan suara, bercermin dari perolehan suara pada pemilihan Ketua MPR yang dimenangkan Amien Rais. Saat itu Gus Dur (memainkan trik politik) mendukung Amien Rais bersaing dengan Matori Abdul Djalil (Ketua Umum PKB) yang didukung PDIP. Akhirnya, dalam pertemuan di rumah BJ Habibie itu, nama Amien Rais disepakati menjadi calon presiden, dengan catatan Amien akan lebih dulu mengonfirmasikannya dengan Gus Dur.

Namun, sebelum konfirmasi itu dilakukan, PKB atas anjuran para kyai dan persetujuan Gus Dur telah lebih dulu secara resmi mendaftarkan pencalonan Gus Dur. Pencalonan

secara resmi Gus Dur ini mengejutkan Poros Tengah (yang sering kali menyebut akan mencalonkan Gus Dur). Juga mengejutkan Golkar dan PDIP bahkan PKB sendiri. Sekali lagi, Gus Dur menunjukkan kepiawiannya yang kontroversial dan mengejutkan.

Peta politik berobah secara mengejutkan. Pencalonan Amien Rais diurungkan. Lalu muncul nama Yusril Ihza Mahendra (Ketua Umum PBB) dari kubu Poros Tengah resmi mencalonkan diri bersaing dengan Gus Dur dan Megawati. Munculnya nama Yusril membuat kubu Megawati sempat lebih optimis akan memenangkan pemilihan. Tapi, kemudian pencalonan Yusril dicabut setelah bertemu dengan Gus Dur. Sekali lagi Gus Dur menunjukkan kelasnya dalam berpolitik.

Gus Dur dari partai kecil (11%), mengalahkan Megawati dari partai pemenang Pemilu (35%). Komposisi keanggotaan MPR hasil Pemilu 1999 yang lebih 90 persen laki-Iaki itu, rupa-rupanya enggan memberikan suaranya kepada Gus Dur, antara lain karena alasan gender. Seorang pengamat politik LlPI menyebutnya sebagai kecelakaan sejarah. Bahkan Gus Dur sendiri pun rupanya merasa kaget dan heran dengan mengata-kan: “Orang buta kok dipilih menjadi Presiden”.

Suasana di luar sidang memanas. Sebab MPR dinilai telah mengesampingkan suara rakyat yang tercermin dalam Pemilu. Namun, dalam kondisi ini, Gus Dur, sekali lagi, menunjukkan kehebatannya. Ia punya kiat yang jitu. Ia merangkul Megawati. PKB secara resmi mencalonkan Megawati dalam perebutan kursi Wakil Presiden, bersaing dengan Hamzah Haz yang didukung Poros Tengah. Megawati pun menang.

Saat itu, tampaknya Gus Dur sangat menyadari kelemahannya. Dalam sambutan pertama beberapa saat setelah ia memenangkan pemilihan presiden, ia mengucapkan terimakasih kepada Megawati dan PDIP yang tidak mempermasalahkan faktor kesehatan pisiknya. Pada awalnya banyak orang optimis bahwa duet Gus Dur-Megawati, yang sejak lama sudah ‘bersaudara’, akan langgeng dan kuat. Apalagi ditopang dengan susunan Kabinet Persatuan yang mengakomodir hampir semua kekuatan politik dan kepiawian Gus Dur dalam berpolitik.

Namun seperti kata pepatah: Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Di mata banyak orang, kepercayaan diri Gus Dur tampak terlalu berlebihan. Ia sering kali melontarkan pendapat dan mengambil kebijakan yang kontroversial. Penglihatannya yang semakin buruk mungkin juga dimanfaatkan oleh para pembisik di sekitarnya. Gus Dur pun sering kali mengganti anggota kabinetnya dengan semaunya berpayung hak prerogatif. Tindakan penggantian menteri ini berpuncak pada penggantian Laksamana Sukardi (PDIP-pemenang Pemilu 1999) dari Jabatan Meneg BUMN dan Jusuf Kalla (Golkar-pemenang kedua Pemilu 1999) dari jabatan Menperindag, tanpa sepengetahuan Wapres Megawati dan Ketua DPR Akbar Tandjung.

DPR menginterplasi Gus Dur. Mempertanyakan alasan pemecatan Laksamana dan Jusuf Kalla yang dituding Gus Dur melakukan KKN. Tudingan yang tidak dibuktikan Gus Dur sampai akhir.

Sejak saat itu, Megawati mulai dengan jelas mengambil jarak dari Gus Dur. Dukungan politik dari legislatif kepada Gus Dur menjadi sangat rendah. Di sini Gus Dur tampaknya alpa bahwa dalam sebuah negara demokrasi tidak mungkin ada seorang presiden (eksekutif) dapat memimpin tanpa dukungan politik (yang terwakili dalam legislatif dan partai).

Anehnya, setelah itu Gus Dur justru semakin lantang menyatakan diri mendapat dukungan rakyat. Sementara sebagian besar wakil rakyat di DPR dan MPR semakin menunjukkan sikap berbeda, tidak lagi mendukung Gus Dur.

Lalu terkuaklah kasus Buloggate dan Bruneigate. Gus Dur diduga terlibat. Kasus ini membuahkan memorandum DPR. Setelah Memorandum II tak digubris Gus Dur, akhirnya DPR meminta MPR agar menggelar Sidang Istimewa (SI) untuk meminta pertanggungjawaban presiden.

Gus Dur melakukan perlawanan, tindakan DPR dan MPR itu dianggapnya melanggar UUD. Ia menolak penyelenggaraan SI-MPR dan mengeluarkan dekrit membubarkan DPR dan MPR. Tapi Dekrit Gus Dur ini tidak mendapat dukungan. Hanya kekuatan PKB dan PDKB (Partai Demokrasi Kasih Bangsa) yang memberi dukungan. Bahkan, karena dekrit itu, MPR mempercepat penyelenggaraan SI pada 23 Juli 2001. Gus Dur, akhirnya kehilangan jabatannya sebagai presiden keempat setelah ia menolak memberikan pertanggung-jawaban dalam SI MPR itu. Dan Wapres Megawati, diangkat menjadi presiden pada 24 Juli 2001.

Selepas SI-MPR, Gus Dur selaku Ketua Dewan Syuro PKB memecat pula Matori Abdul Djalil dari jabatan Ketua Umum PKB. Tindakan ini kemudian direspon Matori dengan menggelar Muktamar PKB yang melahirkan munculnya dua kepengurusan PKB, yang kemudian populer disebut PKB Batu Tulis (pimpinan Matori) dan PKB Kuningan (pimpinan Gus Dur-Alwi Sihab). Kepengurusan kembar PKB ini harus berlanjut ke pengadilan kendati upaya rujuk juga terus berlangsung.

Bapak Bangsa

Setelah tidak lagi menjabat presiden, Gus Dur kembali ke kehidupannya semula. Kendati sudah menjadi partisan, dalam kapasitasnya sebagai deklarator dan Ketua Dewan Syuro PKB, ia berupaya kembali muncul sebagai Bapak Bangsa. Seperti sosoknya sebelum menjabat presiden.

Sebelumnya, Gus Dur adalah Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan anggota sekitar 38 juta orang. Namun ia bukanlah orang yang sektarian. Ia seorang negarawan. Tak jarang ia menentang siapa saja bahkan massa pendukungnya sendiri dalam menyatakan suatu kebenaran. Ia seorang tokoh muslim yang berjiwa kebangsaan.

Gus Dur sering berbicara keras menentang politik keagamaan sektarian. Pendiriannya sering menempatkannya pada posisi sulit, melawan pemimpin Islam lainnya di Indonesia.

Seperti saat didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang diketuai BJ Habibie, Gus Dur secara terbuka menentang. Ia menyebut ICMI akan menimbulkan masalah bangsa di kemudian hari, yang dalam tempo kurang dari sepuluh tahun ternyata pernyataannya itu bisa dibuktikan benar atau tidak. Lalu, ia mendirikan Forum Demokrasi sebagai penyeimbang ICMI.

Meski diakui ia besar antara lain karena NU, visi politiknya diyakini rekan-rekan dekatnya sebagai melebihi kepentingan organisasi tersebut, bahkan kadang melampaui kepentingan Indonesia. Hal ini tercermin dari kesediaannya menerima kedudukan di Shimon Peres Peace Center dan saat dia mengusulkan membuka hubungan dengan Israel. Di masa Orba, saat Soeharto amat berkuasa, Gus Dur, dikenal sebagai salah seorang tokoh yang licin untuk dikuasai. Bahkan Gus Dur dapat memanfaatkan Keluarga Cendana dengan mengajak Mbak Tutut berkeliling mengunjungi pondok-pondok pesantren. Gus Dur juga beberapa kali menyempatkan diri mengunjungi Pak Harto setelah lengser.

Pada masa rezim Soeharto Gus Dur pun tergolong rajin melontarkan kritik kepada pemerintah. Kritikan itu lama-lama menyebabkan Pak Harto risih. Puncaknya terjadi pada Mukhtamar NU di Cipasung 1994. Pemerintah berupaya menjegal Gus Dur. Tapi Gus Dur tetap terpilih untuk periode kedua. Hal ini terekspresikan dari ketidaksudian Presiden Soeharto menerima Gus Dur dan pengurus PBNU lainnya.

Salah satu kiprah Gus Dur yang paling menonjol saat memimpin NU, adalah ketika ia membawa organisasi itu kembali ke khittahnya, keluar dari politik praktis pada 1984. Kendati, pada tahun 1999, ia pula yang membawa NU kembali ke dunia politik meski dalam format yang berbeda karena dilakukan melalui pembentukkan PKB, partai yang selalu dirujuk sebagai 'anak kandung' NU.

Ia juga dikenal sebagai sosok pembela yang benar. Apakah itu kelompok minoritas atau mayoritas. Pembelaannya kepada kelompok minoritas dirasakan sebagai suatu hal yang berani. Reputasi ini sangat menonjol di tahun-tahun akhir era Orde Baru. Begitu menonjolnya peran ini sehingga ia malah dituduh lebih dekat dengan kelompok minoritas daripada komunitas mayoritas Muslim sendiri. Padahal ia adalah seorang ulama yang oleh sebagian jamaahnya malah sudah dianggap sebagai seorang wali.

Pada awal 1998 ia terserang stroke. Tapi tim dokter berhasil menyelamatkannya. Namun, sebagai akibatnya penglihatannya kian memburuk. Pada saat ia dilantik sebagai presiden, ia sudah dideskripsikan media massa Barat sebagai 'nyaris buta.' Selain karena stroke, diduga problem kesehatannya juga disebabkan faktor keturunan yang disebabkan hubungan darah yang erat di antara orangtuanya.

Ia juga pengamat sepakbola yang tajam daya analisisnya. Bahkan, setelah penglihatannya benar-benar terganggu, pada Piala Dunia Juni 2002 lalu, ia masih juga antusias memberi komentar mengenai proyeksi juara.

Selain menjadi idola bagi banyak orang, Gus Dur juga menjadi idola bagi keempat puterinya: Alisa Qortrunnada Munawarah (Lisa), Zannuba Arifah (Venny), Anisa Hayatunufus (Nufus) dan Inayah Wulandari (Ina). Hal ini tercermin dari pengakuan puteri sulungnya Lisa. Lisa bilang, sosok tokoh LSM Gus Dur menurun padanya, bakat kolumnis menurun ke Venny, kesastrawanannya pada Nufus dan sifat egaliternya pada Ina.

Calon Presiden

Ketua Dewan Suryo PKB ini, dicalonkan PKB menjadi Capres berpasangan dengan Marwah Daud Ibrahim sebagai Cawapres Pemilu Presiden 2004.

Namun pasangan ini tidak diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat Gus Dur dinilai tidak memenuhi persyaratan kemampuan rohani dan jasmani untuk melaksanakan kewajiban sebagai presiden, sesuai dengan pemeriksaan kesehatan tim Ikatan Dokter Indonesia. Akibat penolakan KPU (22/5/2004) ini, Gus Dur melakukan berbagai upaya hukum, antara lain menggugat KPU secara pidana dan perdata ke pengadilan dengan menuntut ganti rugi Rp 1 trilyun, melaporkan ke Panwaslu, setelah sebelumnya melakukan judicial review ke MA dan MK. Ia pun berketetapan akan berada di luar sistem jika upaya pencalonannya tidak berhasil.

Namanya masuk dalam nominasi calon presiden Pemilu 2004, sebagai satu-satunya Capres dari PKB. Disebut-sebut bahwa ia masih mendapat dukungan dari para kyai. Dia sendiri membenarkan hal ini dalam beberapa kali pernyataannya.

Namun beberapa politisi dan pengamat politik berharap, Gus Dur bisa mengoptimalkan perannya sebagai salah seorang ‘bapak bangsa’.

Dengan tidak mencalonkan diri sebagai presiden, dia sebagai ‘bapak bangsa’ plus sebagai pemegang kendali (paling berpengaruh) di PKB, dapat memberi pengaruh signifikan dalam perjalanan demokrasi di negeri ini. Kiat-kiat politiknya yang sering kali tak terduga, diperkirakan akan sangat berpengaruh pada pentas poltik nasional.

Bintang Iklan Wiranto-Wahid

Setelah tidak lolos menjadi Capres, dia tampil sebagai bintang iklan pasangan Capres-Cawapres Partai Golkar Wiranto-Solahudin Wahid. Menurutnya Wiranto-Solahudin lebih pantas dipilih daripada pasangan Capres-Cawapres lainnya. Ia merasa yakin Wiranto akan menegakkan demokrasi sesuai dengan pidato-pidato Wiranto. Semenatara Solahudin adik kandungnya sendiri disebut adalah orang bersih karena terbukti lolos uji kelayakan sebelum menjadi Wakil Ketua Komnas HAM.

Penampilan Gus Dur menjadi bintang iklan Wiranto ini, tampaknya semakin menegaskan posisinya yang seringkali kontroversial. Seolah-olah ia tidak mengingat lagi posisi Wiranto sebagai Panglima TNI saat terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan tragedi

Semanggi I dan II. Dalam kerusuhan dan tragedi ini, belum satu pun pejabat teras TNI-Polri yang menyatakan bertanggung jawab, baik secara hukum maupun secara moral.

Tampaknya Gus Dur tidak terpengaruh kepada banyaknya dugaan keterlibatan Wiranto, mantan Panglima TNI dan mantan Ajudan Presiden Soeharto, itu dalam beberapa kasus pelanggaran HAM dan kerusuhan Mei 1998 serta pengerahan Pamswakarsa. Sementara sebagian besar masyarakat merasa belum mendapat penjelasan yang bertanggung jawab dari Wiranto tentang berbagai kasus itu.

Semenara itu, Wiranto sendiri sudah bersumpah-sumpah dalam iklannya agar dipilih rakyat dalam Pemilu Presiden. Wiranto sendiri tampaknya tidak merasa gagal ketika menjabat sebagai Panglima TNI saat mana negeri ini dilanda kerusuhan yang amat mengerikan.

PEMIKIRAN GUS DUR

HARUS BERDASARKAN INFO AKURAT

DALAM sebuah seminar, seorang pejabat tinggi Departemen Agama RI menyatakan perlunya sebuah surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk mengatur rumah ibadah.

Alasannya, ada kemungkinan terjadi pertentangan di masyarakat yang memiliki keyakinan berbeda-beda. Ia sebutkan, misalnya orang Kristen yang membuat gereja sendiri, walaupun hanya memiliki 50 orang pengikut /jamaah, ditakutkan adanya sikap berlebih-lebihan dari mereka.

Karena itu, SKB tersebut menetapkan harus ada jamaah/kongregasi sebanyak 90 orang per rumah peribadatan. Menurutnya, di sinilah arti penting SKB itu, yaitu untuk menghindarkan konflik di antara sesama agama atau di kalangan intern sesama pengikut satu agama.

Inilah landasan bagi SKB tersebut, yang isinya dijalankan Departemen Agama RI . Penulis artikel ini tidak akan membahas benar atau tidaknya keputusan tersebut, tetapi hanya melihat benar atau tidaknya dasar pengambilan keputusan untuk membuat/mengeluarkan SKB itu.

Apa dasar dari jumlah 90 orang jamaah kongregasi rumah peribadatan itu? Sang pejabat tinggi itu mungkin tidak mengetahui, bahkan Menteri Agama tidak tahu akan hal ini. Ia mengira wajar-wajar saja angka patokan itu diambil tanpa mengetahui adanya perkembangan lain yang harus diingat dalam hal ini, yaitu bahwa orang-orang beragama Kristen tetap merasa perlu mendirikan rumah ibadah sendiri walaupun hanya berjumlah 5 orang saja.

Ini karena ada ratusan jamaah/sekte/kongregasi masing-masing dengan peribadatan/liturgi sendiri. Terlihat dalam kasus ini bahwa Menteri Agama yang beragama Islam dan para pejabat yang membuat SKB tersebut tidak mengerti tentang agama Kristen yang mendasarkan diri pada jamaah kongregasi masing-masing.

Kalau ini saja mereka tidak tahu, pantas kalau dasar-dasar ini tidak dimengerti. Lalu, bagaimana dibuat peraturan tentang kegiatan sebuah agama, kalau yang bersangkutan tidak tahu akan hal sepele seperti ini? Sama dengan pertanyaan yang diajukan kepada penulis sewaktu berkampanye bupati di Muara Teweh.

Seseorang bertanya secara terbuka di muka orang banyak, mengapa penulis artikel ini menerima ”kebenaran” ajaran kaum Ahmadiyah dan mendukung sikap mereka? Jawabannya, karena penulis menghormati UUD 1945. Undang-Undang Dasar kita memberikan hak kepada siapa pun untuk mengembangkan keyakinan mereka, berbeda atau tidak dengan sikap pemerintah.

UUD 1945 memberikan jaminan akan hak seorang warga negara untuk bertindak seperti itu. Penulis artikel ini tidak tahu isi ajaran Ahmadiyah, juga tidak mengerti ajaran begitu banyak denominasi Kristen di Indonesia. Bahkan, tidak tahu apa-apa tentang keyakinan agama Buddha, Konghucu, ataupun Dayak.

Ia hanya tahu bahwa konstitusi kita menjamin orang yang yakin akan kebenaran ajarannya. Karena itulah, penulis artikel ini bersikap menjamin hak hidup pengikut Ahmadiyah walaupun ia tidak mengerti inti ajaran mereka. Inilah yang membuat penulis artikel ini berbeda pandangan dari orang-orang seperti M Riziq Shihab dan tetap pada pendiriannya itu hingga berlaku nanti UUD baru.

Hal sepele ini sering dilupakan orang, lalu dijatuhkan tuduhan bahwa penulis artikel ini membela Ahmadiyah. Padahal, ia membela sebuah konstitusi, bukan sebuah gerakan. Mengapa orang sedemikian mudah meletakkan cap menyetujui paham ini dan paham itu tanpa menyelidiki lebih dalam anggapan tersebut? Mungkin karena mereka sedang diburu keinginan agar ada larangan terhadap gerakan tersebut.

Lalu, mengapa ada tuntutan harus dikeluarkan keppres tentang pelarangan Ahmadiyah sekarang juga? Karena mereka sendiri tidak yakin dengan ”kebenaran” tuntutannya itu, paling tidak kebenaran hukumnya. Mereka tahu dalam sebuah pemilu yang jujur dan bersih pandangan yang mendukung jaminan konstitusi itu akan menang.

Karena itulah, mereka menuntut kepada pemerintah. Di sini Susilo Bambang Yudhoyono diuji kesetiaannya terhadap konstitusi 1945. Kalau tidak, berarti kita dipimpin orangorang yang tidak menggunakan UUD 1945, padahal amendemennya belum diundangkan.

Ini juga akibat kelalaian Prof Dr Amien Rais ketika memimpin MPR kita beberapa waktu yang lalu. Dampaknya terasa sekarang, yaitu mereka menggunakan UUD yang belum diundangkan, maka menjadi tidak sah untuk digunakan pada saat ini. Namun, ada menganggap ”kenyataan pahit” itu harus dijalankan bangsa kita pada saat ini.

Tentu saja ada orang yang berpandangan lain, termasuk penulis artikel ini. Marilah kita bertindak jujur kepada diri sendiri. Sebab, hal itu adalah kenyataan yang paling berat, kan?

NASIONALISME DAN POLITIK ISLAM

Beberapa waktu lalu penulis artikel ini ditanya orang. Apakah yang akan terjadi dengan gerakan- gerakan politik Islam di negeri kita? Penulis artikel ini menyebutkan apa yang dinyatakan Soetrisno Bachir dari Partai Amanat Nasional (PAN) tentang hal ini.

Dia menyebutkan bahwa berdasarkan hasil-hasil survei belakangan, organisasi sektarian akan semakin kurang diminati orang dalam pemilu yang akan datang. Karena itu, PAN sudah menentukan akan mengambil dasar-dasar nonsektarian dalam kiprahnya. Ini adalah kenyataan lapangan yang tidak dapat dibantah. Hal tersebut memperkuat kesimpulan penulis artikel ini bahwa memang mayoritas para pemilih dalam pemilu di negeri kita tidak mau bersikap sektarian.

Penulis artikel ini sendiri sudah tidak mengakui klaim bahwa mayoritas penduduk berpikir sektarian. Nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sendiri menunjukkan hal itu. Bagaimana penulis sampai pada kesimpulan tersebut? Karena penulis setia melihat kenyataan, yaitu bahwa Nahdlatul Ulama (NU) memang tidak lagi "menawarkan diri" kepada publik sebagai organisasi sektarian. Walaupun sejak semula ia menggunakan bahasa Arab, NU senantiasa merujuk kepada hal-hal nonsektarian. Contohnya pada 1918 ia menamakan diri "Nahdlatu al-Tujjar (kebangkitan kaum pedagang)", sama sekali tidak digunakan kata Islam.

Begitu juga pada 1922, ketika para ulama itu mendirikan sebuah kelompok diskusi di Surabaya dengan nama Tasywir al- Afkar (konseptualisasi pemikiran). Tahun 1924, didirikanlah madrasah Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air). Pada 1957, NU mengadakan musyawarah nasional alim ulama di Medan yang menghasilkan rumusan tentang presiden Republik Indonesia. Dalam rumusan tersebut, pemegang jabatan dipandang sebagai *waliyyul amri dharuri bi al-syaukah* (pemegang pemerintahan darurat dengan wewenang efektif).

Presiden dikatakan *waliyyul amri* karena ia memang memegang pemerintahan, yakni di zaman Presiden Soekarno (dan sampai sekarang pun masih demikian). Dikatakan *dharuri* (untuk sementara) karena secara teoretis kedudukannya tidak memenuhi persyaratan sebagai imam/ pemimpin umat Islam. *Bi al-Syaukah* karena memang pemerintahannya bersifat efektif. Dengan demikian, tiap-tiap kali akan diadakan pemilihan presiden, para

ulama harus menetapkan apakah sang calon memenuhi ukuran-ukuran bagi imam sesuai hukum agama Islam.

Pada 1978, Rais Aam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH M Bisri Syansuri mengirimkan delegasi ke rumah mendiang Soeharto di Jalan Cendana dengan tugas menanyakan tujuh buah hal. Jika Pak Harto menjawab dengan empat buah hal saja yang benar, ia sudah layak dicalonkan PPP sebagai presiden.Tetapi KH M Masykur, HM Mintareja,dan KH Rusli Chalil (Perti) ternyata tidak menanyakan hal itu, melainkan bertanya bersedia atau tidak Pak Harto menjadi calon presiden dari PPP?

Sementara Harsono Tjokroaminoto tidak turut delegasi tersebut karena sudah "melarikan diri"dari tempat rapat, rumah KH Syaifuddin Zuhri di Jalan Dharmawangsa. Ketika penulis tanyakan kepada beliau bagaimana KH M Bisri Syansuri sebagai Rais Am PPP memandang hal ini, dijawab: beliau adalah salah seorang ulama yang sudah menetapkan *policy* berdasarkan aturan fikih. Dipakai atau tidak adalah tanggung jawab para politisi. Mereka yang akan ditanya Allah SWT di akhirat nanti.

Di sini tampaklah ketentuan yang dipegangi beliau bahwa ada beda antara orang yang menggunakan fikih dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan akal belaka. Hal inilah yang membuat PPP menjadi partai yang sesuai bagi NU di masa itu. Namun, sekarang hal itu sudah tidak berlaku lagi karena PPP sudah digantikan oleh PKB. Kalau hal ini tidak disadari orang, akan terciptalah klaim yang tidak berdasarkan fakta nyata.

Akan tetapi perjuangan menegakkan demokrasi, termasuk memberlakukan ketentuan-ketentuan fikih dan kaidah-kaidah moral dalam kehidupan PKB, juga bukan tugas yang ringan. Dewasa ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) tengah mengadakan penertiban di segala bidang untuk menghadapi pemilihan umum dua tahun lagi. Dalam penertiban tersebut ada empat puluh kepengurusan PKB di tingkat provinsi dan kabupaten dibekukan dengan menunjuk *caretaker* (kepengurusan sementara).

Setelah itu akan dilakukan musyawarah-musyawarah dewan pengurus wilayah (DPW) pada tingkat provinsi dan dewan pengurus cabang (DPC) pada tingkat kabupaten/kota. Sikap ini diambil untuk menghasilkan sebuah proses yang bersih menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dalam rangka pelaksanaan demokratisasi di negeri kita. Kalau ini tercapai, berarti PKB akan merintis jalan baru bagi bangsa dan negara. Sudah tentu kerangka yang dibuat itu tidak akan mencapai hasil apa-apa jika tidak disertai orientasi dan arah pembangunan bangsa dan negara yang benar.

Selama ini, pembangunan nasional kita hanya bersifat elitis, yaitu mementingkan golongan kaya dan pimpinan masyarakat saja. Sejak 17 Agustus 1945, pembangunan nasional kita sudah berwatak elitis. Apalagi sekarang, ketika kita dipimpin orang yang takut pada perubahan-perubahan. Tentu sudah waktunya kita sekarang mementingkan

kebutuhan rakyat dalam orientasi pembangunan nasional kita. Kebutuhan dasar kita sebagai bangsa dan negara menghendaki kita mampu memanfaatkan segenap kekayaan alam sendiri beserta keterampilan berteknologi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Untuk ini kita harus sanggup membagi dua pembangunan kita; di satu pihak perdagangan bebas (termasuk globalisasi) yang berdasarkan persaingan terbuka. Di pihak lain kita memerlukan usaha publik untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang ditetapkan oleh Pasal 33 UUD 1945.Tugas yang sangat berat,bukan?(*)

KETEGARAN PLURALISME AKAR RUMPUT

Bagi sebagian kalangan, kiprah tokoh Nahdlatul Ulama ini sering kali mengundang kontroversi, bahkan rasa tidak simpatik. Namun, di kalangan umatnya warga nahdliyyin, kelompok minoritas, dan mereka yang gigih mendorong pluralisme, Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur ini adalah simbol kebebasan dan kesetaraan.

Bicara apa adanya, blakblakan, dan tidak jarang membuat kuping pendengarnya panas. Ungkapan-ungkapan lantangnya tak jarang membuat orang terkaget-kaget. Bagi pria yang lahir dan dibesarkan di lingkungan pesantren ini, pluralisme adalah keniscayaan sekaligus berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak akan terhapus di bumi Indonesia sampai kapan pun.

Perjalanan sejarah bangsa sejak zaman Kerajaan Majapahit telah membuktikan adanya pluralisme itu. Para pendiri Indonesia juga telah mewariskan nilai-nilai utama dalam membangun kehidupan bangsa yang majemuk. Mereka mampu menempatkan antara agama dan nasionalisme secara seimbang.

Sikap dan perjuangan Gus Dur membela mati-matian pluralisme tidak datang seketika. Ia memahami sejarah kebangsaan dan ke-NU-an dengan cermat, sebelum akhirnya memilih jalan itu. Tokoh-tokoh NU sejak sebelum kemerdekaan, KH Hasyim Asy'ari dan KH Wahab Hasbullah, telah memikirkan bagaimana menempatkan Islam agar dapat berfungsi dalam Indonesia yang majemuk serta menjadikan Islam hidup berdampingan dengan agama lain.

Bahkan, pada Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1935, NU telah memutuskan bahwa Hindia Belanda (nama Indonesia waktu itu) tidak memerlukan Islam sebagai ideologi negara. Namun, umat Islam tetap wajib membela negaranya meskipun negaranya tidak berbentuk negara Islam.

Keputusan ini pulalah yang membuat NU mengakui Pancasila dan UUD 1945 saat ormas-ormas Islam lain masih memperdebatkannya. UUD 1945 dan Pancasila yang

memberikan jaminan atas pluralisme juga banyak mengandung nilai Islam, seperti mewujudkan kesejahteraan bersama serta menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Sering kali Gus Dur mengutip atau bahkan mendasarkan tindakannya sesuai dengan kaidah ushul fiqih, menanggapi keadaan atau situasi bangsa. Dalam soal kepemimpinan, misalnya, Gus Dur sering mengutip kaidah ushul, *tasharruful imam 'alal ra'iyah, manuutun bil maslahah* (kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya, bergantung pada kemasalahan atau kesejahteraan).

Dalam soal pembaruan, Gus Dur juga memakai kaidah ushul *al muhafadzatu 'ala al qadimis shalih, wal akhdu bil jadidil ashlah* (memelihara sesuatu yang lama tetapi baik, dan menerima sesuatu yang baru, yang lebih baik). Artinya, sikap pluralisme Gus Dur sudah terbangun sejak kecil dan menerapkannya pada era modern. Apa yang selama ini dipahami sebagai tradisi, Gus Dur mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih bermakna.

Lihat bagaimana Gus Dur melihat perbedaan pendapat yang sering kali mewarnai para pendiri NU. Menurut Gus Dur, perbedaan itu tidak sedikitpun mengurangi penghormatan mereka terhadap yang lain serta tidak mengurangi sedikit pun keyakinan agamanya. ”Para pemimpin NU telah mewariskan nilai-nilai toleran dan tahu harus bertindak apa dalam kondisi-kondisi tertentu tanpa mengabaikan keyakinannya,” kata Wahid.

Semangat itu pula yang menginspirasinya untuk menjadikan Indonesia yang sejahtera dengan kemajemukan warganya. ”UUD 1945 telah menjamin hak hidup dan kemerdekaan untuk menganut keyakinan dan mengungkapkan pendapat. Ini harus dipertahankan mati-matian apa pun risikonya,” kata Wahid.

Kemanusiaan

Dalam hidup berbangsa, umat Islam perlu saling mengembangkan dialog dan kerja sama dengan umat agama lain. Hanya dengan dialog dan kerja sama inilah yang akan membuat umat Islam terus belajar dan mampu hidup berdampingan dengan umat lain. Kondisi ini menempatkan Islam bukan sebagai alternatif, tetapi sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa.

Memaknai ajaran agama, di mata Gus Dur, juga tidak dapat dilepaskan dari sisi kemanusiaannya. Untuk menjadi penganut agama yang baik, selain meyakini kebenaran ajaran agamanya, juga harus menghargai kemanusiaan. ”Jika kemanusiaan diabaikan, itu adalah pangkal hilangnya nilai-nilai keagamaan yang benar,” katanya.

Fundamentalisme yang marak akhir-akhir ini diyakini tidak akan bertahan lama. Gerakan yang dilakukan oleh kelompok radikal agama ini dinilai Wahid hanya memanfaatkan waktu yang tersisa sembari memanfaatkan sokongan dana dari luar negeri. Radikalisme itu tidak akan mengancam pluralisme selama rakyat Indonesia masih meyakini UUD 1945.

Bagi kalangan minoritas, Wahid dianggap sebagai pembela utama eksistensi mereka. Masyarakat Papua, etnis Tionghoa, atau umat Nasrani menganggap Wahid sebagai pembela di tengah tentangan dan ancaman politis masyarakat atau negara. Menurut Wahid, pembelaan terhadap kelompok minoritas bukan perjuangan gampang. Oleh karena itu, nasib kelompok minoritas yang selama ini tersisih harus terus diperjuangkan sesuai dengan amanat UUD 1945.

”Mereka (kelompok minoritas) hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. UUD 1945 telah menjamin perlindungan bagi semua warga negara tanpa pandang agama, etnis, ataupun budayanya. Ini yang saya lakukan,” katanya.

Menurut Gus Dur, pemerintah tidak perlu melihat segala tuntutan kelompok minoritas hanya dari kacamata politis. Jika segala tindakan kelompok minoritas dipandang sebagai gerakan politis, berarti negara telah kehilangan penghargaan atas keragaman yang dibangunnya sendiri. ”Pluralisme Indonesia paling kuat dibandingkan negara lain. Karena itu, perbedaan itu tidak perlu dipolitisasi,” lanjutnya.

Kegigihannya membela pluralisme inilah yang membuat Wahid pada awal Mei lalu dianugerahi Medals of Valor dari The Simon Wiesenthal Center di Amerika Serikat. Ia dinilai gigih memperjuangkan moderasi dalam Islam dan membangun dialog dengan agama-agama lain dan turut menciptakan perdamaian dunia.

Negara-negara luar umumnya melihat proses toleransi dan demokrasi di Indonesia tetap baik meskipun semangat fundamentalisme dan radikalisme menguat. Keyakinan ini terlihat dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat madani yang ada. Namun, negara asing sering kali dibingungkan oleh sikap pemerintah dan birokrasi yang tidak mampu bersikap tegas dalam menghadapi isu-isu agama.

LAGI-LAGI PELANGGARAN KONSTITUSI

Pada 25 November 2007 sekitar jam 13 WIB, penulis mendapat telpon dari teman lama, Holland Taylor yang berada di Surabaya menemani Prof. Nasr Hamid Abu Zayd. Guru Besar Universitas Leiden Belanda itu diundang oleh Departemen Agama untuk menyampaikan pikiran-pikirannya tentang Islam di sebuah seminar di Malang.

Sebuah kelompok di Riau menggunakan nama Prof. Abu Zayd untuk 'membohongi' publik dengan menyatakan ia sudah setuju pergi ke Riau. Padahal dalam catatan pribadinya, Abu Zayd sama sekali belum dihubungi dan tidak akan pergi ke tempat itu. Namun ia mendapat reaksi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau, dan 'kehadirannya' di sana ditentang oleh ormas tersebut.

Peristiwa seperti itu pernah terjadi sebelumnya itu di beberapa tempat. Lagi-lagi penulis artikel ini mengemukakan permintaan agar MUI jangan menggunakan kata tersesat, serta tidak usah bersikap main hakim sendiri.

Ormas tersebut ternyata melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar kita, yang menjamin kemerdekaan berpikir dan kebebasan berpendapat. Sayangnya, para pemimpin kita menerima pendapat MUI itu. Seperti, Susilo Bambang Yudhoyono yang bersikap mendua. Ia seharusnya membela dan mempertahankan konstitusi, ternyata tidak memiliki keberanian untuk mempertahankannya dari serangan-serangan sebuah ormas seperti MUI. Dengan demikian, sebuah prinsip fundamental seperti kebebasan berpikir dan kemerdekaan berbicara, menjadi korban dari kegalakan suatu pihak di negara ini. Bahkan, sikap itu menunjukkan pelanggaran demikian besar atas UUD yang kita miliki saat ini. Ini sama besarnya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru selama lebih dari tigapuluh tahun lamanya. Padahal kita masih bersusah payah berusaha mengatasi akibat-akibat negatif dari tindakan tersebut.

Karenanya, tidak lain kita terpaksa bersuara dan menunjukkan sikap kita yang jelas atas pelanggaran demi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar itu. Sebenarnya penulis artikel ini sedang tidak bergairah melakukan hal itu, mengingat begitu banyak yang sudah dilakukannya untuk membela konstitusi. Tetapi ia 'terpaksa' melakukannya karena tampaknya seperti seorang diri saja melakukannya. Padahal, ia yakin mayoritas bangsa ini tidak senang dengan 'kesewenang-wenangan' ormas tersebut.

Karenanya, MUI seharusnya menyadari hal ini bahwa ia serupa saja dengan ormas-ormas Islam yang lain seperti Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU). Karena itu menjadi sangat mengherankan, bila Susilo Bambang Yudhoyono mengangkatnya begitu tinggi dan bersikap tidak netral terhadapnya. Akibat 'salah langkah' SBY tersebut, maka keberanian orang untuk melanggar Undang-Undang Dasar itu semakin besar. Diambillah tindakan pelanggaran atas konstitusi itu, dengan mengorbankannya atas nama menjaga konstitusi itu sendiri. Kalau hal ini dibiarkan terus terjadi tanpa koreksi, maka situasi sangat berbahaya untuk kelangsungan salah satu prinsip demokrasi yang menjamin kemerdekaan berpikir dan kebebasan berbicara itu.

Demikian besar arti kekuasaan di tangan seorang penguasa di negeri ini, sehingga 'harus' dicapai dengan segenap cara dan dalih?

Memang, ada saja orang yang berpikir bahwa penulis artikel ini punya kecenderungan mencari-cari persoalan, tetapi ia sebenarnya ingin orang lain yang melakukan hal itu. Sudah waktunya ia yang berusia enam puluh tujuh tahun 'beristirahat'. Tetapi, dalam kenyataan ia masih harus melakukan tugas membela konstitusi itu, setelah lebih dari empat puluh tahun berjuang untuk itu.

Memang sangat sedikit adanya para pemimpin parpol yang bersikap demikian. Pada umumnya mereka hanya berpikir bagaimana mempertahankan kekuasaan yang sudah dimiliki. Bahkan akhir-akhir ini muncul sejumlah pernyataan, agar angkatan muda 'diberi' tempat guna menggantikan para pemimpin politik yang sudah berumur. Sebenarnya permintaan tersebut justru melanggar salah satu prinsip dasar dalam sebuah demokrasi. Ronald Reagan mulai berkiprah untuk menjadi Presiden pada usia di atas 70 tahun. Kepemimpinan politik hanya diraih oleh siapa yang sanggup merebutnya, bukan oleh usia.

Apa yang dikemukakan di atas, lagi-lagi mencerminkan persaingan tidak sehat yang sekarang sedang terjadi dalam dunia kepemimpinan politik kita. Apakah yang sedang terjadi dalam dunia perpolitikan kita sebagai bangsa? Mengapakah kekuasaan menjadi demikian penting, sehingga terjadi pelanggaran konstitusi kita yang menjamin kemerdekaan berpikir dan kebebasan menyatakan pendapat?

Kini, seolah-olah kita bukan lagi bangsa yang dapat menjaga kemerdekaan berpikir dan kebebasan berpendapat. Karena itu, kita harus berani " melawan" kecenderungan salah di atas dan merusak warisan yang ditinggalkan para pendiri negara ini, bukan?

BANGSA KITA DAN PEMBIARAN KEKERASAN

Yogya TV (YTV) secara rutin menayangkan siaran tunda acara Kongkow Bareng Gus Dur (KBGD). Acara yang disiarkan langsung tiap Sabtu pagi jam 10 oleh Radio 68H dari Kedai Tempo, Utan Kayu, ini juga ditayangkan 13 stasiun televisi lokal. Nah, minggu lalu YTV mendapatkan telpon dari orang yang mengaku sebagai Pengurus Front Pembela Islam (FPI) dan Majlis Mujahidin Indonesia (MMI) daerah Yogyakarta. Orang itu mengatakan kepada YTV agar tidak menayangkan lagi KBGD. Alasan yang digunakan, karena dalam salah satu siaran itu, penulis bergurau dengan menyatakan sebab terjadinya gempa bumi di daerah Bantul adalah karena Nyai Ratu Kidul dipaksa mengenakan jilbab oleh Ketua FPI Habib Riziq. Ini berarti, menurut penelpon tadi, Habib Riziq telah dihina oleh Gus Dur dengan lelucon tersebut. Itulah sebab munculnya permintaan berbentuk ancaman dari pengikut Habib Riziq itu.

Mengapa penulis menyampaikan hal tersebut? Karena penulis sudah muak dengan sikap main hakim sendiri dari tokoh tersebut dan anggotanya. Karena ketidakberanian pemerintah untuk menindak FPI dan tokoh tersebut, maka sikap mereka semakin menjadi kurang ajar. Main ancam dan tindakan main hakim sendiri adalah ciri pokok mereka yang harus kita hadapi sebagai bangsa. Padahal FPI itu melanggar undang-undang, yang jelas menyatakan bahwa membawa senjata di muka umum dan merusak milik orang lain adalah pelanggaran hukum. Karena itulah kejengkelan pun semakin lama semakin bertumpuk.

Itulah penyebab sindiran yang dimaksudkan oleh penulis. Tapi bukannya mencari maksud sindiran penulis, FPI malah dengan arogan mengeluarkan ancaman kepada YTV. Sikap yang buruk itu masih diikuti oleh 'penilaian' seorang pimpinan lokal FPI Yogyakarta, yang menyatakan bahwa penulis hanya diikuti satu persen saja dari keseluruhan kaum muslimin di negeri ini. Sisanya mengikuti jalan pikiran FPI. Penulis sendiri terheran-heran dengan pernyataan tersebut. Dengan demikian, mereka menganggap kaum muslimin di negeri ini begitu tololnya.

Ini adalah mispersepsi yang timbul dari kurangnya pengetahuan akan kenyataan-kenyataan obyektif perkembangan sejarah Islam di negeri ini. Mereka mengulang-ulang bahwa Islam lebih maju daripada agama-agama lain, padahal penulis artikel ini yakin akan kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW bahwa " *al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih* " (Islam itu unggul dan tidak terungguli)." Namun karena keyakinan itu maka penulis tidak perlu meremehkan agama-agama lain.

Karena 'sikap terbuka' itu maka penulis artikel ini dengan santai menunjukkan penghormatan kepada penganut agama lain yang ada di negeri kita. Sebagai mayoritas kaum beragama, kaum muslimin di negeri ini sebaiknya melindungi agama lain itu. Hal ini yang justru menunjukkan kekuatan Islam yang sebenarnya.

Umat Islam seperti inilah yang patut disebut umat yang dewasa. Seorang dewasa akan memuji dan melindungi si anak dan tidak akan memaksanya untuk menjadi seorang dewasa. Dengan tidak menghardik si anak, orang justru akan dinilai bijaksana dan

menunjukkan kedewasaan. Kelembutan dianggap jauh lebih bernilai. Dan orang yang berbudi luhur dikenal karena memiliki kekuatan tapi tidak pernah digunakan untuk kekerasan. Seperti dua orang pesilat Cina, yang berputar-putar di atas kotak gelangang. Begitu keduanya beradu kekuatan, maka yang lebih besar tenaga dalamnya, tanpa memforsir tenaga fisiknya, yang akan menang. Dari teriakan masing-masing sudah dapat diketahui siapa yang memiliki tenaga dalam (*lweekang*) paling tinggi. Inilah cara yang diperlihatkan seorang pandai, berbeda dengan seorang bodoh dan lemah.

Masalah yang sangat mendasar dalam hal ini adalah, apa yang harus diperbuat oleh seorang muslim yang cinta kepada agamanya? Haruskah ia menyatakan dengan jelas dan terbuka akan 'kelebihan' Islam? Bagi mereka yang tidak benar-benar yakin 'kelebihan' Islam atas agama-agama lain tentu kelebihan itu haruslah dinyatakan secara berulang-ulang. Dengan berbuat demikian, berarti ia memposisikan Islam sebagai alternatif bagi agama-agama lain itu. Sebaliknya mereka yang benar-benar memahami kebesaran Islam tentu akan bersikap lebih menghargai agama lain dan tidak 'takut' bergaul dengan penganut agama lain.

****

Ketika kemudian FPI Yogyakarta meyampaikan permintaan kedua kepada manajemen YTV yang meminta supaya permintaan pertama itu dianggap tidak ada, maka jelas ini adalah koreksi atas sikap pertama yang meminta acara KBGD dihentikan. Ini masih lumayan, karena menunjukkan kemampuan menggambil sebuah tindakan korektif di kalangan kedua organisasi tersebut. Ataukah karena 'peringatan halus' dari Kapolri agar aksi kelompok itu tidak merugikan siapapun, termasuk dengan pihak penulis artikel ini. Bukankah ini menujukkan sikap setengah-setengah dari pihak Kapolri yang segan membubarkan kelompok-kelompok yang gemar menebar kekerasan dan ketakutan? Jika memang demikian hal itu, berarti benar anggapan orang bahwa kepolisian di masa lalu ada kaitannya dengan pendirian FPI?

Kenyataan-kenyataan inilah yang terjadi dalam sejarah obyektif bangsa kita. Jika kita tidak melakukan koreksi, berarti kita mengorbankan 'obyektifitas' sejarah kita sebagai bangsa? Entahlah, penulis artikel ini sendiri takut akan konsekuensi sikap mengemukakan obyektifitas sejarah bangsa itu. Berat konsekuensi sikap benar seperti itu, bukan

KEKUASAAN DAN EKONOMI POLITIK INDONESIA

Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 kita sudah berada dalam alam kemerdekaan. Tapi kemerdekaan yang dicapai baru hanya di bidang politik. Hal itu terlihat pada kekuasaan negara yang berhasil kita pegang. Bung Karno dengan Pancasilanya berhasil merebut kekuasaan pemerintahan. Ia dan kawan-kawannya, seperti Bung Hatta, Mr. Sartono, dr. Radjiman, dr. Tjipto Mangunkusumo dan seterusnya, pada umumnya adalah para bangsawan dari berbagai tingkatan yang berhasil merebut kekuasaan negara dari tangan penjajah.

Jika pada saat itu ada tokoh politik yang mengajukan gagasan kredit murah untuk kepentingan usaha kecil dan menengah, tentu pembawa usul itu akan ditertawakan orang. Dalam pikiran mereka, dunia ekonomi hanya akan mengalami kemajuan jika dikuasai oleh teman-teman mereka sendiri, para pengusaha dari 'kalangan atas'. Inilah yang mereka anggap sebagai 'kekuatan ekonomi nasional'. Mungkin dalam lingkup ini termasuk ayah penulis sendiri, yaitu dari kalangan petani bertanah (*land owners*).

Kenyataan ini berjalan terus sampai demokrasi terpimpin digantikan oleh Orde Baru yang dibawa oleh Mayor Jendral TNI Soeharto. Secara efektif Orde Baru meneruskan orientasi pembangunan nasional yang hanya mementingkan kalangan atas saja. Demikian pula dengan a pa yang dinamakan masa Reformasi pada tahun 1998, yang dianggap membawa perubahan cukup besar. Namun tetap saja orientasi pembangunan kita, yang masih ditentukan oleh kepentingan 'kalangan atas', itu baru mengacu pada pertumbuhan (*growth*). Pembangunan ekonomi kita lalu menuju kepada penjualan barang (ekspor) secara besar-besaran. Karena itulah pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk impor barang secara besar-besaran pula. Dengan demikian, jumlah barang yang diimpor harus dibiaya oleh kredit luar negeri yang besar pula sehingga hutang nasional kita terus menerus ditambah. Ini membuat ketergantungan kita kepada negara-negara lain membengkak.

Orde Baru digantikan oleh apa yang dinamakan Orde Reformasi, yang segera saja direbut oleh para teknokrat. Sebenarnya, mereka tidak lain adalah kaum profesional yang menganut faham pertumbuhan ekonomi di atas. Tercapailah pertumbuhan besar-besaran bagi negeri kita, yang tidak berumur lama. Segera saja perekonomian nasional kita dihadapkan kepada krisis berkepanjangan yang belum selesai hingga saat ini. Salah satu penyebabnya, karena tidak ada perubahan berarti dalam pandangan para pimpinan parpol dalam pembangunan nasional dan kepemimpinan negara . Tidak ada seorangpun yang berpikir tentang bagaimana menyelesaikan krisis eknomi yang berkepanjangan itu, dengan segenap konsekuensinya. Padahal, kita harus mempunyai arah yang jelas dalam orientasi pembangunan kita. Kenyataan memaksa kita untuk mengikutnya sampai jarak tertentu.

Juga sulit untuk memperhitungkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi dunia, yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Walaupun prinsip pembangunan ekonomi nasional kita, mengharuskan adanya kemerdekaan kebebasan berniaga dalam bentuk persaingan bebas (*free competition*). Karena itu, kita harus memberikan

kemerdekaan untuk bersaing secara bebas bagi perusahaan-perusahaan asing di negeri kita. Tetapi, disamping itu harus diingat bahwa sisi lain dari dunia usaha kita justru menginginkan adanya perlindungan pemerintah atas usaha kecil dan menengah. Tentu saja, hal itu terkait dengan pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan perlu diberikan perhatian khusus untuk pemenuhan kebutuhan pokok dari rakyat.

Hal ini pernah dialami Andrew Jackson, yang menjadi Presiden AS pada tahun-tahun 1830-an. Dalam kebijakan Jackson, UUD A.S menetapkan bahwa RAPBN (budget) mengharuskan seorang presiden untuk membiayai pendidikan, kerja-kerja sosial, kesehatan dan hal-hal sejenis untuk rakyat. Oleh sebab itulah, dia mengangkat seorang gubernur bagi American Federal Reserve System (yang di negeri kita dikenal dengan nama Bank Sentral alias Bank Indonesia). Dengan pengangkatan itu, Jackson tidak menyalahi liberalisme ekonomi yang mengharuskan adanya persaingan bebas dalam pengaturan ekonomi. Pelajaran inilah yang sangat penting untuk kita perhatikan dengan serius.

Namun dalam menyelenggarakan perekonomian nasional ini, di samping perlunya kemakmuran negara kita sendiri, kita juga harus maju bersama dengan negara-negara dunia berkembang (*developing countries*) lainnya. Sewaktu menjabat sebagai presiden, penulis didatangi utusan Presiden Bill Clinton, yaitu Winston Lord, Pembantu Menlu AS urusan Asia dan Pacific . Ia bertanya kepada penulis adakah kerjasama ekonomi yang diusulkan dengan membentuk Poros Indonesia- Republik Rakyat Tiongkok dan India, dimaksudkan untuk mengeliminir Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi? Penulis menjawab tidak, melainkan untuk mengembangkan kemampuan ketiga negeri tersebut untuk bersaing dengan A.S. Dua hari kemudian Gedung Putih mengeluarkan pernyataan, bahwa A.S mendukung gagasan kerja sama ekonomi itu.

Jadi agar segala sesuatu menjadi terbuka bagi semua pihak, perlu ada kejelasan dari kita sendiri. Jelaslah, dari apa yang disebutkan di atas bahwa dalam pemikiran penulis, hubungan antara ekonomi politik dan kekuasaan sangatlah besar. Nah, kesalahan kita selama ini adalah tidak jelasnya orientasi pembangunan ekonomi nasional kita sendiri. Seharusnya, kita juga menggunakan orientasi kehidupan yang dibawakan oleh agama, yaitu pentingnya akhlak mulia dan keadilan dalam kehidupan kita. Masalah yang sederhana tetapi juga sangat rumit, bukan?

POLITIK LAWAN BUDAYA DALAM ISLAM

Islam di banyak negri menampilkan wajah politik lebih banyak daripada wajah budayanya. Karena itu, penampilan Islam sebagai wadah kajian senantiasa berurusan dengan negara dan bukannya dengan bangsa. Ini adalah kenyataan sejarah yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Bahkan gerakan budaya (dalam hal ini pendidikan) yang bernama al-Ikhwan al-Muslimun, sebelum Perang Dunia ke-2 di Mesir yang dicetuskan oleh Hassan al-Banna (dihukum gantung karena gerakan itu) 'dicuri' orang dan pada ujungnya menjadi gerakan politik, adalah sebuah bukti dari kuatnya kecendrungan tersebut.

Dewasa ini gerakan tersebut sudah resmi menjadi gerakan politik, seperti terjadi di Jordania dan Saudi Arabia. Gamal al-Banna, adik terkecil dari Hasan mencoba membuktikan melalui serangkaian tulisan, bahwa organisasi tersebut adalah organisasi budaya. Tetapi sejauh ini, Gamal belum dapat menghilangkan gambaran bahwa perkumpulan tersebut sebagai sesuatu yang politis.

Sebenarnya, pandangan mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia justru tidak menghendaki gagasan Islam politik. Kebanyakan mereka melihat Islam sebagai sesuatu yang bersifat budaya/kultural. Wacana ini dibuka oleh Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan tahun 1926. Pada tahun 1936 dalam muktamarnya di Banjarmasin (Borneo Selatan) dengan dihadiri sekitar enam ribu ulama, NU membuat dua keputusan yang sangat penting bagi masa depan Bangsa Indonesia. Para ulama NU dihadapkan pada pertanyaan: "wajibkah kaum muslimin di Hindia Belanda, mempertahankan kawasan tersebut yang dikuasai non-muslim?" Jawaban muktamar itu adalah: "kawasan itu wajib dipertahankan." Ini diperkuat dengan refrensi dari *Bughyah al-Mustarsyidin*. Pertanyaan berikut adalah: "untuk melaksanakan syariat Islam, wajibkah didirikan sebuah Negara Islam?" Keputusan muktamar itu menyatakan: "tidak wajib."

Kedua pendapat di atas sangat dipengaruhi kemunculannya oleh dua orang yang masih terikat dalam hubungan persaudaraan, yaitu H.O.S Tjokroaminoto dari kota Surabaya dan KH. M. Hasyim Asy'ari. Mereka masih bersaudara, walaupun yang satu tokoh Syarikat Islam (belakangan berkembang menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia/ PSII), sedangkan yang satunya lagi adalah salah seorang pendiri NU. Bahkan ia kemudian diangkat menjadi Ra'is Akbar NU dengan temannya sesama santri KH. A. Mahfudz Dimyati dari Termas (Pacitan) dan Wakil Ra'is Akbar KH. Faqih Maskumambang dari daerah Dukun (Gresik). Kegigihan KH. M. Hasyim Asy'ari adalah membuat 'terobosan' dalam pemikiran kalangan tradisional di antara gerakan Islam yang berkembang di kawasan Hindia-Belanda.

H.O.S. Cokroaminoto dan KH. Hasyim Asy'ari masih merupakan keluarga, karena keduanya berasal dari keluarga keturunan Ki Ageng Basariah dari Sewulan (+10 km selatan Madiun). Di lingkungan inilah lahir beberapa orang pemimpin gerakan Islam di negeri kita, seperti KH. A. Kahar Mudzakir dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, KH. A.

Wahid Hasjim dari NU di PP Tebu Ireng Jombang, Alm. KH. A. Wahab Chasbullah dan Abdul Munir Mulkan dari kalangan Muhammadiyah dewasa ini, dan lain-lain. Pada intinya, mereka selalu menyuarakan gerakan Islam sebagai gerakan budaya/ kultural.

Inilah yang membedakan mayoritas kaum muslimin di Indonesia, dari gerakan Islam di negeri-negeri lain. Tokoh-tokoh besar gerakan Islam di Indonesia masa lampau pun mengikuti pola budaya ini. Oleh sebab itu suara yang dibawakan NU lalu menjadi sesuatu yang sangat longgar penerapannya, karena selama ini banyak kalangan gerakan Islam di banyak negara seluruh dunia berwatak politis. Ditambah lagi mereka memiliki/ menguasai 'media Islam', dengan sendirinya pendapat mereka yang bersifat politis yang dianggap mewakili 'pandangan Islam' di negeri ini. Dengan demikian wacana gerakan Islam lebih banyak terlihat sebagai wacana politis.

Pendapat NU lalu diperlakukan sebagai pandangan kelompok minoritas. Ini terjadi karena *misspersepsi*/ pandangan yang dangkal sejumlah pengamat bahwa mayoritas gerakan Islam di Indonesia bersifat politis. Penyatuan antara negara dan Islam sebagai agama justru berkembang dari luar gerakan Islam negeri kita. Karena itulah kita tidak usah heran menyaksikan ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, merumuskan syariat Islam dalam kehidupan bernegara, seperti tertuang dalam Piagam Jakarta. Baru setelah seorang beragama Kristen, yaitu A.A. Maramis dari Sulawesi Utara menyuarakan keberatannya, lalu Muh. Hatta keesokan harinya memimpin sidang perwakilan berbagai gerakan Islam (Ki Bagus Hadikusuma dan KH. A. Kahar Mudzakir dari Muhammadiyah, A. Rahman Baswedan dari Partai Arab Indonesia, Abikusno Tjokrosuyoso dari PSII, Ahmad Subarjo, KH. A. Wahid Has'jim dari NU dan H. Agus Salim sebagai tokoh independen) membuang tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut.

Hampir seluruh dunia memandang gerakan Islam bersifat politik sebagai gerakan fundamentalis/radikal. Pandangan itu lalu menganggap pandangan budaya dari NU sebagai 'moderat'. Penamaan serampangan seperti inilah yang lalu menciptakan kesan salah tentang gerakan Islam di seluruh dunia. Padahal kita juga melihat berbagai gerakan Islam seperti al-Qaidah yang dipimpin oleh Osama Bin Laden dari Afghanistan (bukankah lebih tepat Saudi Arabia?) dengan rasa was-was karena militasinya yang sangat tinggi. Juga lahirnya pendapat berbagai gerakan Islam, seperti Hizbut Tahrir di negeri kita, akan perlunya sistem pemerintahan berupa kekhalifahan, yang jelas-jelas merupakan pandangan politik yang bertentangan dengan UUD kita. Sulit rasanya untuk membenarkan gerakan-gerakan tersebut.

Tetapi misteri seperti inilah yang membuat buku yang ada di tangan pembaca ini, menjadi sesuatu yang menarik dan perlu ada. Jika beberapa waktu yang lalu Majalah Tempo bermotto "enak dibaca dan perlu", bukankah pembahasan tentang perlunya Islam budaya dan Islam politik kita lakukan, juga demikian?

ARGUMENTASI RASIONAL DAN IRASIONAL

Seorang Don (pemimpin) Mafia baru saja diangkat, menggantikan abangnya yang menjadi Don lama yang meninggal dunia. Ia membawa sejumlah uang dan pergi kepada seorang Pastor Katholik di Boston. Don baru itu menyatakan kepada Sang Pastor: “Ini ada uang kontan satu juta dollar AS. Ini buat Anda, kalau dalam upacara penguburan abang saya nanti Anda katakan bahwa ia adalah Santo (orang suci).”

Sang Pastor menyanggupi permintaan Don baru itu. Dalam upacara penguburan tersebut ribuan pelayat datang untuk mengetahui argumentasi Sang Pastor. Sang Pastor pun menyatakan: “Hari ini kita menguburkan orang yang paling jahat di Amerika Serikat. Pembunuhan, perampokan, perkosaan, narkoba, penyelundupan dan segala macam kejahatan pernah ia lakukan. Tapi, kalau dibandingkan adiknya yang menjadi Don baru, ia adalah Santo.”

Cerita di atas menggambarkan bagaimana kuat, sekaligus rapuh, sebuah argumentasi kalau dilihat dari sudut rasionalitas. Sesuatu dapat saja mengandung argumentasi rasional maupun irasional sekaligus. Ini tergantung pada bagaimana kita memahami argumentasi itu sendiri. Inilah yang sebenarnya menjadi inti kritik Immanuel Kant terhadap apa yang disebutkan sebagai “pemurnian rasional”. Kant berpendapat, bahwa pembuktian rasional sebenarnya lemah, dan dapat saja berkembang menjadi argumetasi irasional.

Hal ini muncul dalam argumentasi kaum Sunny (*ahlu sunnah wa al-jama’ah*) tentang adanya Tuhan. Orang non Sunny dapat saja bertanya, al-Qur’an sebagai kalam Ilahi, dapatkah dianggap sebagai makhluk seperti halnya pandangan sekte-sekte lain di kalangan kaum muslimin? Tentu saja kaum Sunny ‘terpaksa’ membuat argumentasi rasional mereka.

Dalam kitab *al-Ibanah*, Imam As’yari dalam abad ke 5 Hijriyah menyatakan bahwa kitab suci al-Qur’an adalah kalam Ilahi. Ini berarti, ia adalah ungkapan Allah Maha Besar, yang membuat kitab suci tersebut, sebagai sesuatu yang abadi adalah sisipan kata Maha itu sendiri. Dengan demikian, tambahan kata Maha itu, merupakan argumentasi rasional bahwa al-Qur’an bukanlah makhluk.

Lagi-lagi, kita berurusan dengan pemakaian kategori yang tidak dapat dipahami secara rasio. Namun pemakaiannya dengan menambahkan kata Maha, menjadikannya sebagai kesimpulan rasional. Seperti halnya dengan kata mahasiswa, yang membedakannya dari siswa dan kategori-kategori lain. Sesuatu yang tidak rasional dijadikan rasional, dengan tambahan kata Maha tersebut. Ini sama saja seseorang membuat sendiri sebuah tulisan, dan kemudian menyatakannya sebagai tulisan terbaik.

Dalam perkembangan sejarah di negeri kita, sesuatu yang logis dinyatakan secara tidak logis telah terjadi berkali-kali, sebagaimana halnya dengan kata Islam. Yang tadinya berkonotasi logis, seperti istilah pendidikan Islam, hukum Islam (*fiqh*) dan negara Islam. Tetapi kemudian hal logis itu dijadikan sesuatu yang tidak logis. Yaitu ketika ia yang

bersifat umum itu dijadikan bersifat khusus, alias milik satu golongan saja, seperti kata santri.

Semula dalam bahasa Pali, santri digunakan oleh kaum Buddha di negeri ini yang memiliki arti "mereka yang mengerti penafsiran kitab suci dan agama". Namun, kini ia hanya dipakai untuk menunjuk kepada mereka yang mengerti isi dan maksud kitab suci kaum muslimin, al-Qur'an dan hukum-hukum Islam. Kita seolah-olah tidak dapat menggunakannya dalam konteks kaum non muslimin. Perkembangan sejarahlah yang membuatnya demikian.

Ketika kata pesantren dipakai oleh semua pihak, bukankah itu berarti penggunaan rasional? Dan di masa kini, ketika ia digunakan hanya untuk menunjuk kepada tempat kegiatan kaum muslimin saja, bukankah itu berarti sebuah perkembangan irasional. Pengakuan akan kenyataan itulah yang membuat kaum muslimin bersikap rasional atau irasional. Pengakuan bahwa seolah-olah pesantren hanyalah milik kaum muslimin saja yang menjadikannya argumentasi irasional.

Di sini kita sampai kepada sebuah kenyataan lain. Bahwa anggapan pesantren adalah 'milik' kaum muslimin saja. Sama dengan argumentasi irasional, ketika dinyatakan bahwa pondok pesantren harus menggunakan nama berbahasa Arab. Apa yang dahulu dikenal sebagai Pondok Pesantren Tebuireng, Rejoso (Peterongan) di Jombang, Tambak Beras dan Denanyar, sekarang rasanya bukan lembaga Islam kalau tidak menggunakan bahasa Arab.

Maka jadilah nama Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Tebuireng, Pesantren Darul Ulum di Rejoso, PP Bahrul Ulum di Tambak Beras dan PP Mambaul Ma'arif di Denayar, semuanya terletak di Kabupaten Jombang. Perubahan nama sebuah lembaga, yang dari yang berargumentasi rasional menjadi irasional, wajar saja dilakukan orang. Karena ini adalah kepelbagaian kaum muslimin yang berlaku di negeri ini. Kita harus bersikap jauh memandang ke depan, tidak membuatnya sebagai sesuatu yang 'mati'. Bukankah ini menunjukkan ketinggian derajat pluralitas yang kita miliki? Bukankah justru pluralitas seperti ini, membuat kita secara kultural menjadi bangsa dan umat yang kaya, bukan?

ANTARA NKRI DAN FEDERALISME

Istilah NKRI dipakai oleh para pendiri negara ini untuk menunjukkan bahwa ia adalah sebuah negara dengan kepemimpinan tunggal dan arah perjalanan hidup yang sama bagi warga bangsa ini.

Namun kini istilah yang berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia, sering dijadikan lawan bagi sebuah istilah lain, yaitu keberbagaian (pluralitas) dan toleransi. Padahal itu semua perlu ada, untuk menjawab tantangan yang mengganggap kita tidak mungkin membuat sebuah negara dan bangsa yang bersatu.

Beberapa bidang telah memiliki format persatuan yang jelas sehingga tidak memerlukan penegasan. Contohnya adalah bahasa nasional kita yang dikembangkan dari bahasa Riau, antara lain oleh Raja Haji Ali,yang dimakamkan di Pulau Penyengat.

Dari bahasa Riau itu, kemudian muncul dua buah bahasa pada tingkat nasional, yaitu bahasa nasional kita -dikenal dengan nama bahasa Indonesia. Juga bahasa nasional Malaysia -disebut juga bahasa Malaysia. Untuk mendukung keberadaan bahasa Indonesia itu, dibuatlah istilah NKRI. Tentu saja, hal-hal seperti itu tidak pernah dijelaskan dengan gamblang.

Kesatuan dan ‘federalisme’ ternyata berkembang dengan baik dalam pengelolaan negara. Lalu timbul keinginan untuk menekankan kesatuan sehingga dengan sendirinya istilah NKRI semakin banyak muncul dalam pembicaraan di kalangan bangsa kita.

Sebab lainnya adalah banyaknya tuntutan otonomi yang akan semakin memupus kekuatan pusat (dan tentu saja semakin kuatnya kekuatan pemerintah daerah dan penambahan kekuasaannya).

Ada pihak yang merasa bahwa kedua hal itu tidak perlu dikemukakan lagi, minimal dalam rumusan resmi berbagai instrumen dasar negara kita. Dengan sendirinya, hal itu akan diliput oleh berbagai undang-undang organik. Dengan demikian, instrumen-instrumen dasar tersebut tidak perlu kita ubah dan tidak perlu adanya amandemen.

Namun sekarang pola dialog tentang UUD menjadi “kemasukan angin” dan kita lalu berdialog dengan menggunakan istilah yang berbeda- beda. Sebenarnya, kerancuan dialog inilah yang harus kita mengerti, bukannya “salah sambung” yang terjadi antara kita sendiri.

Memang, mencari pengertian yang sama tentang sesuatu hal, apalagi yang terkait dengan instrumen dasar sebuah negara, bukanlah pekerjaan mudah. Ia memerlukan juga kejujuran mutlak di samping kemampuan (*expertise*).

Karena itu, dialog di antara berbagai pihak tentang instrumen dasar negara seperti digambarkan di atas memerlukan kesabaran dan jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, cara “menyelesaikan” masalah undang-undang dasar kita memerlukan ketabahan yang boleh di kata luar biasa. Karena itu, panjangnya waktu dan penunjukan siapa yang membicarakan undang-undang dasar itu, menjadi sangat penting bagi negara kita. Penilaian akhir tentang perlu atau tidaknya UUD kita di amandemen, bukanlah perkara kecil.

Dalam sebuah halaqoh tentang konstitusi dan temu wicara hukum acara yang diselenggarakan DPP PKB dan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, penulis menyatakan bahwa penulis adalah korban dari sebuah komplotan jahat yang akhirnya memaksa untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI pada 21 Juli 2001.

Mengapa penulis menamakan proses itu sebagai komplotan? Berarti ada sesuatu yang melanggar hukum dan menentang konstitusi? Jawabnya karena hal itu memang demikian, Dimulai dari Pansus Bulog dan Brunei Gate, yang dipimpin Bachtiar Chamsyah. Hal itu saja sudah dapat menunjukkan adanya proses idealisasi nilai-nilai yang dianggap “Islami” sebagai capaian yang harus diperoleh organisasi-organisasi Islam. Bukankah itu pelanggaran konstitusi? Bachtiar Chamsyah sendiri melakukan pelanggaran undang-undang dengan membiarkan pintu sidang-sidang pansus terbuka sekitar sepuluh centimeter. Maksudnya, agar para wartawan dapat merekam pembicaraan yang terjadi dalam ruangan.

Padahal, sebuah undang-undang secara spesifik melarang sidang-sidang pansus dilakukan secara terbuka. Memang, karena dari semula sejumlah parpol dan perwira tinggi TNI sudah memutuskan untuk menyingkirkan penulis dari jabatan Presiden RI. Karena itu, segala macam pelanggaran dibiarkan saja. Bahkan, alasan formal yang tadinya berupa ‘pelanggaran legalitas’ oleh penulis, akhirnya tidak dapat dibuktikan. Akibatnya, diambil keputusan politik untuk menyingkirkan penulis dari jabatan kepresidenan.

Langkah itu diambil dengan berbagai macam pelanggaran, seperti tidak adanya pembicaraan hal itu di DPR RI dan pelanggaran di Mahkamah Agung, ketika keputusannya diberitahukan kepada MPR RI oleh ketua Mahkamah Agung RI. Padahal, undang-undang menyatakan bahwa hal itu harus diputuskan dan disampaikan oleh sebuah komisi khusus di lingkungan MA sendiri.

Penulis bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut, hanya karena ia tidak menyukai perang saudara antara sesama warga negara RI, yang tentu akan menimbulkan korban jiwa.

Nah, kepentingan pribadi para pemimpin partai untuk melengserkan penulis, ternyata membawakan konsekuensinya sendiri sehingga soal-soal yang berkaitan dengan kondisi hukum nasional kita terabaikan sama sekali dan tidak dibicarakan lagi.

Namun tentu saja, di antara hal yang penting dibicarakan dalam masalah pelanggaran terhadap konstitusi adalah akibatnya yang semakin banyak. Yaitu merajalelanya korupsi di hampir semua bidang kehidupan. Baik oleh warga negara di luar pemerintahan, juga oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Contohnya yaitu kemalasan para birokrat untuk mendasarkan perbuatan mereka kepada kemampuan lembaga-lembaga pemerintahan.

Kaum birokrasi pemerintahan yang mana pun, membawa cara kerja mereka sendiri dalam menentukan sikap lembaganya. Langkanya penertiban atas cara kerja para pegawai negeri yang jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang itu, menimbulkan sikap bahwa hal itu harus mati-matian dipertahankan. Herankah kita kalau hal seperti itu melahirkan pendapat bahwa korupsi tidak bisa hilang dari negeri kita?

NU, NASIONALISME, DAN POLITIK

Kenyataan politik di bawah kolonialisme Belanda menyadarkan aktivis gerakan Islam dan gerakan nasionalis sebelum masa kemerdekaan. Dari kesadaran itulah lahir berbagai gerakan Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Walaupun "berbaju" gerakan kultural, tapi lingkup pembahasan di kalangan mereka bersifat politis. Tidak heran jika para tokoh mereka juga berwajah nasionalis. Dalam lingkungan gerakan-gerakan Islam di luar Indonesia, muncul orang-orang seperti Jamaluddin al-Afghani, yang menyuarakan pentingnya arti kemerdekaan bagi kaum muslimin sendiri. Demikian juga halnya dengan berbagai gerakan Islam di negeri kita waktu itu. Apalagi, ketika HOS Tjokroaminoto di Surabaya mengambil menantu Soekarno di tahun dua puluhan.

Soekarno yang waktu itu sudah "terbakar" melihat nasib bangsa-bangsa terjajah, mulai mencari bentuk perjuangan politik untuk kemerdekaan bangsanya. Memang, dalam waktu sepuluh-dua puluh tahun baru tampak hasilnya, tetapi bagaimanapun juga kiprah para pemuda itu menunjukkan arah yang jelas: menolak penjajahan dan menuntut kemerdekaan. Kongres Pemuda 1928 nyata-nyata menunjukkan hal itu. Ini sekaligus merupakan pantulan hasrat kemerdekaan dari berbagai orang muda yang berasal dari berbagai daerah. Mereka mencita-citakan apa yang di kemudian hari dikenal sebagai Republik Indonesia. Mereka kemudian memimpin pembentukan apa yang kemudian hari dikenal dengan nama bangsa Indonesia.

Dua raksasa di lingkungan gerakan-gerakan Islam, yaitu Muhammadiyah dan NU, memimpin kesadaran berbangsa melalui jaringan pendidikan yang mereka buat. Walaupun Muhammadiyah merintis pendidikan yang "lebih banyak" mengacu kepada hal-hal duniawi, seperti penguasaan pengetahuan umum, dan NU mengacu kepada pengetahuan agama, namun keduanya sangat dipengaruhi oleh apa yang berkembang di lingkungan gerakan nasionalis. Nasionalisme dalam arti menolak penjajahan, berarti juga pencarian jati diri sejarah masa lampau negeri sendiri.

Para pemuda mendapati bahwa sejarah masa lampau kawasan ini menyajikan hal-hal lain di luar ideologi nasionalisme, seperti pluralitas budaya dan rasa toleransi yang tinggi antara berbagai budaya daerah.Pada waktu bersamaan, di negeri lain muncul juga orang-orang seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Sun Yat Sen. Sejak semula, lahir juga di kalangan gerakan-gerakan Islam: golongan yang tidak memedulikan nasionalisme. Mereka hanya mengutamakan perhatian kepada masalah-masalah keislaman belaka.

Mereka melihat kepada hal-hal yang penting menyangkut kehidupan kaum muslimin belaka. Cukup lama terjadi "pemisahan" antara kedua pihak, nasionalis dan kalangan Islam. Kedua-duanya pun mengambil sikap tidak memedulikan keadaan satu sama lain. Pembelaan (pleidoi) Bung Karno di muka Pengadilan Negeri Bandung pada 1931 yang berjudul Indonesia Menggugat seperti hanya dibaca kalangan nasionalis saja, dan tidak oleh kalangan Islam. Dalam keadaan seperti itu, rakyat kehilangan contoh-contoh mereka

yang memberikan apresiasi terhadap perjuangan yang dilakukan. Jadilah “perjuangan Islam” seolah-olah terpisah dari gerakan nasionalisme.

Hanya hubungan kekeluargaan antara HOS Tjokroaminoto dan KH M Hasyim Asy’ari dari Tebu Ireng, Jombang, saja yang membuat persamaan itu hampir terlihat. Hasyim Asy’ari memang menyadari bahwa secara kultural, gerakan Islam dan nasionalis berbeda satu dari yang lain, tetapi dari sudut ideologi berupa kebutuhan akan kemerdekaan, kita adalah satu bangsa. Di saat-saat menentukan seperti itu, apa yang dipikirkannya itu lalu disebarkan kepada sanak keluarga terdekat, kemudian kepada organisasi yang dipimpinnya: NU. Tentu saja hal ini tidak berlangsung secara mulus. Bagaimanapun, sikap seperti itu masih menjadi pandangan minoritas.

Tampak nyata ketika pandangan integratif yang menyatukan agama dan cita-cita kemerdekaan itu dibawa ke dalam lingkungan NU. Namun, di kalangan generasi muda NU, pemikiran seperti itu sudah mulai dapat diterima dengan baik. Dalam tahun-tahun menjelang Perang Dunia II, KH Mahfudz Siddiq, umpamanya, mengemukakan prinsip perjuangan “khaira ummah” (umat yang baik), yang diambilkan dari ayat Alquran: “Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan antara sesama manusia karena kalian memerintahkan yang baik dan menolak yang tidak baik (*kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta’muruuna bil ma’ruuf wa tanhauna ’anil munkar*).”

Pendapat ini dikemukakan ketika ia dalam usia muda menjadi Ketua NU di tahun menjelang Perang Dunia II. Istilah itu ia gunakan untuk menunjukkan pentingnya memperkuat posisi ekonomi-finansial warga NU sebagai anggota gerakan Islam. Atau dapat dikatakan prinsip tersebut guna mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM), yang akhir-akhir ini menjadi lebih penting lagi. Jelas dari gambaran itu, bahwa kalangan muda lebih memahami konteks kebangsaan. Cukup menarik bukan?[]

KIKAT KIAI KAMPUNG

GUNTUR Romli, salah seorang kalangan muda NU yang menyatukan pemikiran-pemikirannya tentang berbagai masalah, dan salah seorang pimpinan Jaringan Islam Liberal (JIL), menyatakan bahwa 'kiai kampung' mendukung penulis dalam sikap-sikap politiknya.

Sayangnya, beberapa hal tidak dikemukakannya secara terbuka. Melalui tulisan ini, penulis ingin mengemukakan hal-hal itu secara terbuka dan diharapkan dengan itu pengertian orang banyak tentang kiai kampung akan menjadi lebih jelas. Diperlukan adanya kejelasan dalam hal ini, karena peranan kiai kampung dalam Pemilu 2009 akan menjadi sangat besar.

Kalau KPU/KPUD dapat dibenahi dan menjaga kebersihan dirinya, kiai kampung dapat terdorong untuk 'mengarahkan' para pemilih kepada pihak PKB. Bahkan, ada kemungkinan PKB menjadi partai terbesar dalam pemilu tersebut. Karena itu, keberadaan kiai kampung menjadi sangat penting dalam kehidupan politik yang sedang dibangun bangsa ini. Istilah 'kiai kampung' adalah kata yang digunakan penulis untuk menunjuk salah satu dari dua macam kiai yang ada dalam masyarakat kita, selain ada kiai sepuh dan sebangsanya, yaitu mereka yang menjadi pengasuh pesantren- pesantren besar seperti Lirboyo, Langitan, Tebuireng, dan sebagainya.

Mereka menjadi pihak yang tidak lagi mampu berkomunikasi langsung dengan rakyat,karena para pengasuhnya adalah kiai-kiai yang bergaul -dalam bahasa pesantren 'disowani', oleh kiai-kiai yang 'kelasnya' ada di bawah mereka. Jadi, mereka tidak lagi berhubungan langsung dengan rakyat, tetapi dengan para penghubung. Yang menyekat hubungan langsung dengan para penganut itu, dapat saja berupa kiai-kiai pondok pesantren yang kecil, para pejabat pemerintahan ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan peranan mereka.Bahkan,banyak juga kiai sesepuh yang 'berkenalan' dengan uang, kekuasaan dan jabatan.

Banyak juga di antara kiai kampung itu yang dihadapkan kepada 'keharusan' menghadapi penilaian-penilaian oleh kiai sesepuh tentang keadaan yang dihadapi. Tetapi mereka juga harus mendengarkan pendapat orang-orang pinggiran, rakyat kecil, maupun pihak-pihak lain yang tidak masuk ke lingkaran kekuasaan. Nah,dalam suasana adanya keadaan-keadaan yang saling bertentangan itu,kiai kampung harus lebih sering mendengar pendapat mereka yang berada di luar lingkar kekuasaan itu. Sudah tentu ini merupakan pola hubungan timbal balik yang sehat antara para kiai kampung itu dan rakyat yang mereka pimpin.

Pola komunikasi antara kedua belah pihak itu tentu saja dapat dibalik, yaitu sangat besarnya pengaruh dari orang-orang masyarakat itu dan kiai kampung. Karena itu, dapatlah dipertanggungjawabkan anggapan bahwa kiai kampung lebih mengerti keadaan dan perasaan rakyat kecil. Apa yang dikemukakan di atas, sebenarnya adalah proses pendangkalan pemahaman agama, akibat berkembang masyarakat secara horizontal. Dahulu, para kiai utama (seperti halnya KH M. Hasyim As'yari dari Tebuireng,

Jombang) masih dapat meluangkan waktu untuk mendengarkan warga masyarakat yang berbagai-bagai itu, karena mereka berada di luar lingkaran kekuasaan pemerintah. Sebagai hasil, komunikasi antara mereka dan rakyat kecil tetap terpelihara dengan baik.

Tetapi sekarang, kiai-kiai utama itu harus menghabiskan waktu untuk berhubungan dengan orang-orang pemerintahan maupun elite kekuasaan.Ini berarti lebih kecil peluang untuk berkomunikasi dengan orang-orang biasa. Kalau masalah ini saja sudah membuat jarak komunikasi antara kiai dan rakyat kecil, dapat dibayangkan bagaimana komunikasi dapat berjalan lancar antara rakyat kecil dan para kiai yang menjadi besan ataupun berkeluarga dengan elite politik dalam masyarakat.

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat dibayangkan bagaimana besarnya pengaruh perubahan sosial dari perkembangan yang terjadi dalam hidup bermasyarakat. Hal-hal seperti inilah yang sering luput dari perhatian kita. Belum lagi berbagai perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari perjumpaan antara elite politik dan para kiai sesepuh membawa akibat-akibat yang tidak terduga sebelumnya.

Dilihat dari sudut pandangan ini,sebenarnya ilmu-ilmu sosial tertinggal dari perkembangan keadaan dalam masyarakat luas. Ini antara lain dapat dilihat pada penggunaan bahasa dalam masyarakat kita. Walaupun bunyinya sama, ada perbedaan besar dalam penggunaan bahasa yang sama itu oleh berbagai kelompok.

Kalangan mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para intelektual menggunakan bahasa yang tidak sama dengan kelompok lain.Kaum birokrat umumnya menggunakan bahasa semu (euphimisme), seperti kata diamankan untuk menyatakan ditangkap. Rakyat kecil, dengan demikian mendapati bahwa mereka berada di luar lingkaran kekuasaan dalam segala hal, termasuk dalam komunikasi. Karena itulah, mereka mengembangkan dua hal sekaligus. Di satu pihak, mereka melakukan komunikasi intern dengan bahasa sendiri.

Bahasa itu tidak sedikit mempunyai konotasi serius. Umpamanya saja,mereka menggunakan kata bonek (bondo nekat) untuk membuat euphimisme mereka sendiri atas keadaan yang terjadi. Di sisi lain, mereka kembangkan sikap seolah-olah tidak peduli kepada perubahan yang terjadi, dan dengan demikian mengembangkan apa yang oleh mantan Presiden Amerika Serikat, mendiang Richard Nixon disebut sebagai ”mayoritas membisu”(*silent majority*). Dari sinilah, kita lalu dipaksa menerima kebisuan sebagai alat komunikasi.Hal-hal seperti di atas menunjukkan kita harus mampu memahami hakikat segala permasalahan, termasuk pemunculan kiai kampung.(*)

ARAB-ISRAEL PERLU BERNEGOSIASI KEMBALI

Keseimbangan teror antara bangsa Israel dan Palestina kini ada dalam kenyataan berikut: Hezbollah dan Israel sama-sama mengajukan klaim akan kemenangan politik mereka. Pemimpin Hezbollah mengklaim kemenangan dicapai dengan bukti pasukannya tidak hancur oleh serangan militer Israel ke Lebanon Selatan.

Israel juga mengajukan klaim meraih kemenangan karena tujuan yang diharapkan tercapai, yaitu menegakkan eksistensi Israel dari ancaman yang timbul akibat diculiknya seorang serdadu Israel Gilad Shalit oleh orang Palestina garis keras.

Dua pihak yang nyata-nyata mengalami kerugian dan menjadi korban akibat serangan militer Israel selama 34 hari itu pasti orang-orang sipil Lebanon di Beirut Selatan. Pemerintahan Ismail Haniyah yang juga pemimpin Hamas, yang kedudukan tawarnya tidak berubah, sedangkan beberapa menteri dan anggota parlemennya ditahan Israel.

Jika dikaitkan dengan adagium Von Clausewitz, ahli strategi perang Jerman dari masa lampau yang menyatakan, peperangan adalah kelanjutan dari perundingan yang gagal, dan perundingan adalah kelanjutan dari peperangan yang terhenti, maka pihak ketiga dalam sebuah konflik, baik militer, tokoh politik, atau lainnya, dapat "memaksakan" perundingan demi menghindari korban-korban lebih jauh.

Dalam perang Padri di Sumatera Barat tahun 1821-1837, Jenderal Belanda De Kock "memaksa" pihak ulama maupun kaum adat membuat permufakatan semu guna menghentikan peperangan tanpa mengubah keadaan terlalu banyak. Hasil dari permufakatan ini adalah kemenangan semu masing-masing pihak. Kalangan hukum adat merasa menguasai keadaan, antara lain dengan membuat masyarakat Minangkabau tetap memperoleh hak untuk melanjutkan sistem matriarchat (jalur keibuan) di dalam pembagian harta waris yang ditinggalkan si mati.

Sebaliknya, para ulama yang melaksanakan syariah pun mengajukan klaim, kini dalam masyarakat Minangkabau berlaku adagium: adat besandi syara' dan syara' basandi kitabullah. Adagium ini memungkinkan orang untuk meninggalkan hukum adat dan menggunakan hukum Islam/fikih.

Dengan demikian, warga Minangkabau dapat memilih antara kedua cara itu dalam pembagian waris di antara mereka. Padahal kini dalam lingkup Indonesia, ada faktor ketiga yang memungkinkan masyarakat Minangkabau memilih penggunaan hukum waris perdata nasional, baik di masa kini maupun masa depan.

Perkembangan hukum seperti ini merupakan sesuatu yang amat menarik. Ini tentu tergantung bentuk-bentuk perubahan di masa depan, termasuk konsep nagari dan otonomi daerah selanjutnya.

Tak ada perang lagi?
Kini, kita sedang menunggu sampai seberapa jauh pemerintahan PM Ismail Haniyah mencapai "hak-hak" yang dituntutnya dari Israel sebelum negosiasi antara pihaknya dan pihak Israel dapat dimulai.

Padahal sebelumnya pemenang pemilu di kalangan bangsa Palestina itu bersuara amat keras bahwa pemerintahan Persatuan Nasional di Palestina tidak akan mengakui Israel, tetapi pengakuan itu sendiri tetap diberikan oleh PLO/Gerakan Al-Fattah.

Demikian halnya dengan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert yang selalu meneriakkan tiga hal yang diisyaratkan Amerika Serikat, masyarakat Eropa, Rusia, dan PBB, yaitu pengakuan atas Israel, dihentikannya tindakan terorisme, dan dihormatinya hasil-hasil perundingan yang dicapai PLO selama ini.

Dari perkembangan keadaan saat ini, rasanya perang Israel- Hezbollah di Lebanon tidak akan pecah lagi. Maka, perdamaian yang "dipaksakan" oleh pasukan- pasukan PBB di Lebanon akan dapat dipertahankan.

Hal inilah yang paling maksimal dapat kita pertahankan. Kenyataan ini rasanya akan terjadi dalam waktu lama, diselingi hal- hal lain, baik dari tanah Palestina sendiri maupun luarnya.

BIROKRATISASI GERAKAN ISLAM

Yang dimaksudkan dengan birokratisasi adalah keadaan yang berciri utama kepentingan para birokrat menjadi ukuran. Sama saja halnya dengan militerisme jika kepentingan pihak militer merupakan ukuran utama bagi perkembangan sebuah negeri. Jadi bukannya apabila kaum birokrat turut serta dalam kepemimpinan, seperti halnya jika para pemimpin militer ada dalam pemerintahan. Kata kunci dalam kedua hal ini adalah di tangan siapa kekuasaan itu.

Ada seorang pengamat militer dan ahli strategi perang dari Eropa Barat lebih dari seabad yang lalu, Carl von Clausewitz, mengatakan bahwa "perang terlalu penting untuk hanya diputuskan oleh para jenderal saja. Jadi perang adalah sebuah keputusan besar, yang secara teoretik harus diputuskan oleh seluruh rakyat dari sebuah negara". Demikian juga dengan gerakan Islam.

Gerakan Islam di negeri ini sudah ada, secara resmi dan terorganisasi lahir bersama hadirnya Muhammadiyah sejak tahun 1912. Namun sesuatu yang harus dipahami secara mendalam adalah Nahdlatul 'Ulama (NU), yang lahir pada tahun 1926, mempunyai asal-usul yang sama tuanya dengan Muhammadiyah. Yaitu ketika berabad-abad yang lalu, para ulama Islam mulai berbeda pendapat mengenai ziarah kubur dan sebangsanya.

Ulama yang memperkenankan hal itu, di kemudian hari adalah orang yang mendirikan NU. Sedangkan yang melarang kemudian mendirikan Muhammadiyah, sementara mereka yang ingin 'menjembatani' di antara kedua organisasi tersebut, pada akhirnya mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di tahun-tahun tujuh-puluhan. Pembedaan yang demikian sederhana ini, dilakukan untuk mempermudah pengertian kita saja.

Penguasaan Negara

Pada tahun 1984, Presiden Soeharto memutuskan untuk 'berubah haluan'. Kemudian ia melakukan upaya Islamisasi, melalui berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Sebagai seorang militer dan karena tidak mau disebut berpihak kepada salah satu dari kedua organisasi Islam di atas, maka Soeharto memilih untuk tidak mengutamakan aspek budaya dari gerakan Islam, melainkan lebih menekankan pada aspek kelembagaan/institusionalnya saja.

Hal ini 'sejalan' dengan sikap Partai Katolik di bawah pimpinan Kasimo yang memberikan tempat khusus kepada gerakan Islam, sejak 1945. Sikap ini diambil sebagai penghargaan atas 'kesediaan' gerakan Islam untuk menerima Pancasila dan 'meninggalnya' gagasan negara Islam. Dengan tidak disadari akibatnya, maka sikapnya terhadap posisi kementerian/Departemen Agama lalu menjadi sejarah tersendiri dalam

kehidupan kita sebagai bangsa dan negara, yaitu semacam persepsi bahwa departemen itu adalah berbidang banyak (multidimensi) dan merupakan semacam negara dalam negara.

Baru belakangan ada koreksi atas hal ini, dalam bentuk munculnya keinginan memperkecil ruang gerak departemen tersebut. Namun, birokratisasi di lingkungan Departemen Agama seperti sudah tidak dapat dihambat lagi. Segala hal dicoba untuk ’diagamakan’ dan sering tanpa mengingat batasan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam bentuk pemisahan agama dari negara, yang terutama dalam bentuk bantuan negara kepada gerakan Islam. Muncul sebagai gantinya adalah penguasaan negara atas agama.

Sikap seperti ini tentu saja menguatkan peranan institusional dari gerakan Islam. Segera saja, Departemen Agama mendorong terjadinya institusionalisasi gerakan Islam dengan cepat. Lahirlah MUI dalam tahun 1975 yang segera berkembang dengan pesat, karena didorong oleh anggaran belanja teratur dari Departemen Agama dan oleh manuver-manuver politik Presiden Soeharto waktu itu. Ciri utama MUI sejak berdiri adalah kepengurusannya di sisi oleh para pensiunan Departemen Agama dan nonpegawai negeri yang berposisi lemah. Dalam waktu sebentar saja MUI dibuat lebih mementingkan aspek kelembagaan gerakan Islam daripada pengembangan aspek kulturalnya. Hampir-hampir tidak ada pengecualian atas hal tersebut, termasuk dalam ’kebiasaan seremonialnya’.

Hilangnya Independensi

Di samping itu, keinginan untuk ’menyehatkan’ cara-cara kerja gerakan Islam, membuatnya terlalu jauh mengikuti proses institusionalnya saja. Dengan demikian, hilanglah sedikit demi sedikit tradisi gerakan Islam yang mengutamakan posisi non-pemerintah. Kalau dahulu KH M Hasjim As’yari dan kawan-kawan ’melawan’ pemerintahan kolonial dengan keputusan-keputusan agama murni, karena mereka bukan pegawai negeri, maka kini hilanglah tradisi itu sedikit demi sedikit.

Jika kenyataan bahwa KH A Wahid Hasjim menjadi Menteri Agama dan Abdurrahman Wahid menjadi Presiden di Republik ini tanpa menjadi pegawai negeri, maka itu adalah nostalgia belaka, dari perkembangan yang umum terjadi di lingkungan gerakan Islam sekarang. Kepengurusan NU pada tingkat provinsi pun, hampir seluruhnya sekarang dipegang oleh pegawai negeri yang hanya berpikir institusional saja.

Dengan demikian berkembanglah ’sikap ketergantungan’ kepada negara, dengan akibat hilangnya sedikit demi sedikit independensi yang dahulunya dimiliki gerakan Islam. Tentu saja orang tidak dapat berharap untuk ’menghilangkan’ aspek kepegawaian negeri itu, dari gerakan Islam di negeri ini. Tetapi toh tidak ada salahnya untuk berharap hilangnya ketergantungan itu.

Dalam pertemuannya dengan bermacam-macam lembaga dan tokoh-tokoh NU di daerah-daerah, penulis selalu dihadapkan kepada serba kurangnya ’fasilitas umat’. Yang umum terdengar adalah pernyataan semacam "pesantren kami melarat karena tidak dibantu oleh Pemda". Keluhan-keluhan semacam ini sungguh memilukan hati, karena itu berarti

terkikisnya sebuah tradisi masa lampau, yang membuat Islam berkembang di negeri ini. Yaitu tetap berdiri walaupun berhadapan dengan pemerintahan kolonial yang secara keuangan/finansial sangat kuat posisinya.

Bahkan, tekanan-tekanan pemerintah untuk memenangkan Golkar dalam pemilu di masa lampau, tetap dihadapi dengan tenang oleh umat Islam. Terpaksalah pemerintah (termasuk ABRI), melakukan manipulasi suara dan intimidasi untuk memenangkan pemilihan umum bagi Golkar di masa-masa lampau.

Penulis rindu kepada masa-masa seperti itu, ketika posisi masyarakat sangat kuat dan sanggup menandingi kedudukan birokrasi pemerintahan. Padahal, sekarang kita harus menghadapi kenyataan bahwa proses globalisasi juga memasuki kehidupan kita sebagai bangsa. Sebagai reaksi atas globalisasi itu, kemunculan fundamentalisme agama harus diperhitungkan sejajar dengan kemunculan nasionalisme sempit, seperti soal visa sementara orang- orang Papua ke Australia.

Sekarang kita lihat, mengapa kita mengalami krisis multidimensi demikian panjang? Salah satunya adalah gerakan Islam (dan juga gerakan-gerakan lain) sudah terlalu jauh mengalami birokratisasi. Bagaimana mungkin kita tangani korupsi (yang melibatkan kepentingan kaum birokrat) dengan baik, kalau kita tidak berani berpegang kepada kedaulatan hukum? Demikian juga, kalau kita tidak berani menegakkan kewibawaan aparat keamanan dan membiarkan ormas-ormas keagamaan Islam melakukan kekerasan, dengan sendirinya kendali atas keadaan hilang sama sekali.

Herankah kita jika nanti masyarakat mengambil inisiatifnya sendiri, karena jalan-jalan lain telah tertutup? Dalam hal ini, kita lalu tertegun oleh sebuah kenyataan: bukankah masyarakat sendiri yang akan menentukan perlunya sesuatu dalam kehidupan kolektif kita dilestarikan atau justru diubah?

SURGA DAN AGAMA

Beberapa hari setelah tertembaknya Dr. Azahari di Batu, Jawa Timur, Habib Rizieq menyatakan (dalam hal ini membenarkan ungkapan) bahwa pelaku terorisme di Indonesia itu akan masuk surga. Ia menyampaikan rasa simpati dan menilainya sebagai orang yang mati *syahid*. Pernyataan ini seolah memperkuat pendapat seorang teroris yang direkam dalam kepingan CD, mati dalam pemboman di Bali akan masuk surga. Ini tentu karena si teroris yakin akan hal itu. Dengan demikian jelas bahwa motif tindakannya dianggap melaksanakan ajaran agama Islam. Ungkapan ini sudah tentu dalam membenarkan dan menyetujui tindak kekerasan atas nama Islam. Benarkah demikian?

Pertama-tama, harus disadari bahwa tindak teroristik adalah akibat dari tidak efektifnya cara-cara lain untuk ‘menghadang’, apa yang dianggap sang teroris sebagai, hal yang melemahkan Islam. Bentuk tindakan itu dapat saja berbeda-beda namun intinya sama, yaitu anggapan bahwa tanpa kekerasan agama Islam akan ‘dikalahkan’ oleh hal-hal lain, termasuk modernisasi ‘model Barat’. Tak disadari para teroris, bahwa respon mereka bukan sesuatu yang murni dari agama Islam itu sendiri. Bukankah dalam tindakannya para teroris juga menggunakan penemuan-penemuan dari Barat? Ini terbukti dari berbagai alat yang digunakan, seperti perkakas komunikasi dan alat peledak. Bukankah ini menunjukkan hipokritas yang luar biasa dalam memandang kehidupan?

Demikian kuat keyakinan itu tertanam dalam hati para teroris, sehingga sebagian mereka bersedia mengorbankan jiwa sendiri dengan melakukan bom bunuh diri. Selain itu juga karena adanya orang-orang yang mendukung gerakan teroris itu. Patutlah dari sini kita memeriksa kebenaran pendapat itu. Tanpa pendekatan itu, tinjauan kita akan dianggap sebagai ‘buatan musuh’. Kita harus melihat perkembangan sejarah Islam yang terkait dengan hal ini sebagai perbandingan.

Dalam sejarah Islam yang panjang, ada tiga kaum dengan pendapat penting yang berkembang. Kaum Khawarij menganggap penolakan terhadap setiap penyimpangan sebagai kewajiban agama. Dari mereka inilah lahir para teroris yang melakukan pembunuhan demi pembunuhan atas orang-orang yang mereka anggap meninggalkan agama. Lalu ada kaum Mu’tazilah, yang menganggap bahwa kemerdekaan manusia untuk mengambil pendapat sendiri tanpa batas dalam ajaran Islam. Mereka menilai adanya pembatasan apapun akan mengurangi kebebasan manusia. Di antara dua pendapat yang saling berbeda itu, ada kaum Sunni yang berpandangan bahwa kaum muslimin memiliki kebebasan dengan batas-batas yang jelas, yaitu tidak dipekenankan melakukan tindakan yang diharamkan oleh ajaran agama Islam, salah satunya bunuh diri.

Mayoritas kaum muslim di seluruh dunia mengikuti garis Sunni ini dan menggunakan paham itu sebagai batasan perlawanan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Karenanya, penulis yakin bahwa orang yang membenarkan terorisme itu berjumlah sangat kecil. Itulah sebabnya, dalam sebuah keterangan pers penulis menyatakan bahwa Islam garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin Habib Rizieq, adalah kelompok kecil dengan pengaruh sangat terbatas. Ini adalah kenyataan sejarah yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Akibat dari anggapan sebaliknya, sudah dapat dilihat dari sikap resmi aparat penegak hukum kita yang terkesan tidak mau mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap mereka itu.

Kita perlu mendudukkan persoalannya pada rel yang wajar. *Pertama*, pandangan para teroris itu bukanlah pandangan umat Islam yang sebenarnya. Ia hanyalah pandangan sejumlah orang yang salah bersikap melihat sejumlah tantangan yang dihadapi ajaran agama Islam. *Kedua*, pandangan itu sendiri bukanlah pendapat mayoritas. Selain itu, terjadi kesalahan pandangan bahwa hubungan antara agama dan kekuasaan akan menguntungkan pihak agama. Padahal sudah jelas, dari proses itu sebuah agama akan menjadi alat pengukuh dan pemelihara kekuasaan. Jika sudah demikian agama akan kehilangan peran yang lebih besar, yaitu inspirasi bagi pengembangan kemanusiaan. Selain itu juga akan mengurangi efektivitas peranan agama sebagai pembawa kesejahteraan.

Agama Islam dalam al-Qur'an al-Karim memerintahkan kaum muslimin untuk menegakkan keadilan, sesuai dengan firman Allah "Wahai orang-orang yang beriman, tegakkan keadilan" (*Ya ayyuha al-ladzina amanu kunu qawwamina bi al-qisthi*). Jadi yang diperintahkan bukanlah berbuat keras, tetapi senantiasa bersikap adil dalam segala hal. Begitu juga dalam kitab suci banyak ayat yang secara eksplisit memerintahkan kaum muslimin agar senantiasa bersabar. Tidak lupa pula, selalu ada perintah untuk memaafkan lawan-lawan kita. Jadi sikap 'lunak' dan moderat bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan sebaliknya sikap terlalu keras itulah yang 'keluar' dari batasan-batasan ajaran agama.

Berbeda dari klaim para teroris, Islam justru mengakui adanya perbedaan-perbedaan dalam hidup kita. Al-Qur'an menyatakan "Sesungguhnya Ku-ciptakan kalian sebagai lelaki dan perempuan dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa untuk saling mengenal" (*Inna khalaqnakum min dzakarin wa untsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu*). Dari perbedaan itu, Allah Swt memerintahkan "berpeganglah kalian pada tali Allah dan janganlah terpecah belah" (*wa i'tashimu bi habl Allah jami'an wa la tafarraqu*). Berbagai perkumpulan hanyalah menandai adanya kemajemukan/pluralitas di kalangan kaum muslimin, sedangkan aksi para teroris itu adalah sumber perpecahan umat manusia.

Kebetulan, negara kita berpegang kepada ungkapan Empu Tantular 'Bhinneka Tunggal Ika' (berbeda-beda namun tetap satu juga). Kaum muslimin di negeri ini telah sepakat untuk menerima adanya negara yang bukan negara Islam. Ia dicapai dengan susah payah melalui cara-cara damai. Jadi patutlah hal ini dipertahankan oleh kaum muslimin. Karena

itu, kita menolak terorisme dalam segala bentuk. Jika mereka yang menyimpang belum tentu masuk surga, apalagi mereka yang memberikan ‘rekomendasi’ untuk itu.

TAHAN BERPOLITIKKAH PONDOK PESANTREN?

Dalam apa yang dinamakan ‘Muktamar Sukolilo’ di Surabaya baru-baru ini, kubu Alwi Shihab mengalami permasalahan yang cukup serius. Pertama, KH. Abdullah Faqih dari Pondok Pesantren (Ponpes) Langitan di Tuban, menyatakan siap bertemu penulis kapan saja. Penulis mensyaratkan pertemuan itu harus diselenggarakan di luar ponpes tersebut, karena ‘biang kerok’ persoalan antara beliau dan penulis, terletak pada salah seorang putra beliau yaitu Gus Ubed. Selain itu dalam forum tersebut, KH. Idris Marzuki dan Ponpes Lirboyo mendahului pulang ke Kediri karena kecewa tokoh yang ingin dijadikan Ketua Umum Dewan Tanfidz Saifullah Yusuf tidak bersedia menempati posisi itu, dan malah ‘mengatur’ agar Choirul Anam yang terpilih. Dengan kepulangannya itu, KH. Idris Marzuki dianggap akan menekuni ponpes yang dipimpinnya, dan bukannya aktif dalam kegiatan politik seperti yang dilakukannya dua tahun terakhir ini.

Dari peristiwa-peristiwa itu, muncul pertanyaan tentang ‘ketahanan’ ponpes dalam politik praktis. Pertanyaan itu merupakan bagian dari hubungan ‘tidak wajar’ antara ponpes dengan dunia politik praktis, yang dimulai dari kedekataan antara para pengasuh ponpes dengan para pejabat atau tokoh pemerintahan. Ini tampak jelas, bahwa salah satu pemeo: jika “wakaf” dari orang-orang non-muslim sah-sah saja, apalagi sumbangan dari pejabat yang pada umumnya yang sama sekali ‘tidak mengikat’. Untuk sejumlah ponpes, yang memang para pengasuhnya ‘mengikatkan diri’ dengan para pejabat dan tokoh di atas, mereka lalu tidak memandang penting ‘kebersihan diri’ dari virus politik yang sangat berbahaya itu. Sehingga banyak tokoh-tokoh ponpes yang ‘tergelincir’ secara politis, sehingga tidak dapat mengambil tindakan bagi kepentingan rakyat banyak dan masyarakat pada umumnya.

Hal ini sangat berbeda dengan masa KH. A. Wahab Chasbullah menjadi Ra’is Aam NU dan wakil beliau, KH. Bisri Syansuri. Penulis masih ingat, sewaktu ia masih kecil bagaimana KH. Wahab Chasbullah habis-habisan menentang gagasan Bung Karno untuk membubarkan semua parpol dan tinggal satu partai saja yang boleh berdiri di Indonesia. Begitu juga ketika Bung Karno mempersiapkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, KH. Bisri Syansuri menentang habis-habisan DPR-RI, yang menurut beliau pada waktu itu, adalah hasil pemilihan umum tahun 1955. Kalau harus diganti maka gantinya harus dipilih, dan bukannya ditunjuk oleh Bung Karno. Untuk itu, beliau menghadapi semua tekanan termasuk datangnya tiga orang perwira RPKAD (sekarang Kopassus), dengan bersenjata lengkap dan melakukan intimidasi di ponpes beliau.

Dari dua contoh di atas terlihat bahwa para pimpinan ponpes masa lampau mendasarkan pandangan mereka pada aturan-aturan agama, bukannya pada uang dan sejenisnya.

Contoh terkenal dalam hal ini, adalah Ra'is Akbar NU KH. M. Hasjim Asy'ari dari Tebuireng Jombang yang 'membiarkan diri' ditangkap *Kempetai* (polisi rahasia Jepang), karena ia menolak untuk melakukan *seikirai* (upacara membungkuk badan untuk mendukung Kaisar Jepang). Menurut beliau, hal itu sama saja dengan mengakui bahwa Kaisar Jepang adalah keturunan Dewa Matahari (*Amaterasu*) sesuatu hal yang tidak akan mungkin dilakukan secara keagamaan bagi seorang muslim, yang hanya mengakui kekuasaan Allah SWT semata-mata. Untuk sikapnya itu, ia harus membiarkan tangan kirinya lumpuh karena siksaaan polisi rahasia Jepang tersebut.

Dengan demikian telah terjadi perubahan kualitatif dari sikap dan pandangan para kyai dari ponpes dalam kurun waktu sekitar setengah abad ini. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, berapa besarkah perubahan pandangan dan sikap tersebut? Dalam pandangan penulis, ternyata perubahan-perubahan yang terjadi tidaklah besar. Secara kuantitatif, dari sekitar seratus ribu orang kyai yang ada di Indonesia saat ini, ternyata paling tinggi hanya 11 orang yang mengalami perubahan pandangan akibat perkembangan politik. Itupun dapat dibagi dua adanya perubahan pandangan itu.

Ada yang berpandangan, mereka berubah karena faktor uang dan hal-hal yang sejenis, tetapi lebih banyak faktor pandangan 'politik' seperti contohnya adalah KH. Abdurrahman Chudlori dari Ponpes Tegalrejo (Magelang) dan KH. Hanif Muslich dari Ponpes Al-Futuhiyah di Mranggen (Demak). Sikap kedua orang itu didasarkan pada pandangan bahwa orang-orang non-muslim tidak dapat menjadi pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Padahal ini dilakukan penulis agar PKB yang 'campur baur' menjadi parpol yang besar di kemudian hari. Di sinilah terletak perbedaan antara PKB dan NU. Penulis harus merelakan orang-orang itu berada di luar PKB, yang juga berarti sikap untuk membesarkan NU. Penulis pernah menyatakan, kedua orang itu pantas memimpin NU tetapi tidak pantas mengurusi parpol. Ini tetap menjadi pandangan penulis sampai hari ini. Dua sikap penulis itu adalah untuk menjunjung NU, walaupun dua institusi itu memiliki wajah yang sama sekali berbeda dalam dunia politik. Di sini jelas, alasan bagi perbedaan pandangan itu adalah hasrat membesarkan NU semata-mata.

Perbedaan pandangan yang demikian fundamental antar mereka yang ingin berkiprah dalam NU semata-mata dan mereka yang ingin berkiprah bagi NU melalui PKB, adalah konsekuensi dari pilihan kegiatan yang dilakukan. Dilihat dari sudut pandang ini jelas ponpes menempuh strategi yang saling berbeda, dan melalui bidang yang berbeda-beda pula dalam perjuangan. Kalau dilihat prospeknya, ponpes memiliki kemampuan untuk 'bermain politik' melalui wadah yang saling berbeda. Ini berarti hampir seluruh ponpes mampu bermain politik secara dewasa. Hanya sedikit ponpes yang kehilangan kemampuan bermain politik itu, karena faktor uang dan kekuasaan, yang dalam jangka panjang akan membunuh kemampuan ponpes itu.

Politik yang dijalankan mayoritas ponpes seluruh Indonesia adalah mengembangkan sikap 'melayani kebutuhan' berbagai pihak di luar dari mereka. Artinya, 'peranan agama' dalam penciptaan kemakmuran dan keadilan bagi bangsa dan negara ini ternyata tidak pupus dan bahkan justru menunjuk kepada masa depan yang gemilang. Dengan kata lain, peranan agama dalam dunia perpolitikan di negeri kita tidaklah pudar, bahkan semakin

cerah dan nyata di masa depan. Marilah kita songsong era ini dengan membenahi ‘sasaran-sasaran politik’ yang ingin dicapai. Inilah yang sangat menggembirakan bagi penulis, dan menimbulkan harapan akan masa depan yang cerah bagi PKB dan parpol-parpol lain dalam pemilu yang akan datang.

Setelah era politik parpol-parpol yang berebut kekuasaan, disusul oleh kekuasaan kaum profesional dan kemudian tentara/militer selama tigapuluh tahun lebih, kini datanglah era untuk menyaksikan munculnya peranan lembaga-lembaga keagamaan (seperti ulama dan sebagainya). Kalau dari pihak-pihak sebelumnya tidak begitu banyak hasil yang diperoleh, maka bagaimana dengan kepemimpinan ulama yang disimbolkan oleh pengaruh ponpes dalam berpolitik? Dapatkah mereka membawakan kemakmuran dan keadilan bagi bangsa ini, dengan menciptakan masyarakat yang kuat dan negara yang besar? Seperti halnya faktor-faktor lain dalam pembangunan, ponpes juga harus terlibat dengan pelestarian dan pembuangan jauh-jauh beberapa aspek dari kehidupannya. Ini adalah hal yang biasa terjadi dalam sejarah manusia, bukan?

CINTA KONSEPTUAL DAN CINTA KONGKRET

Minggu lalu, kembali penulis memutar *compact disc* (CD) di mobilnya dan mendengarkan lagu-lagu *hard rock* yang diciptakan Dhani Dewa. Penulis memutar lagu-lagu tersebut untuk mencari tahu apa sebabnya pihak-pihak 'Islam garis keras' marah kepadanya dan berniat menyeretnya ke pengadilan? atau minimal untuk 'menakuti' anak-anak muda yang hendak membeli kaset atau CD tersebut. Sampai-sampai terpaksa penulis membelanya, demi mempertahankan terhadap kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Dasar dengan adanya tindak kekerasan terhadap grup band ini. Karena alasan yang digunakan, sama sekali tidak masuk akal manusia yang berpikir sehat.

Menentang sesuatu secara terbuka dan terang-terangan, tanpa kejelasan sebab-sebabnya adalah perbuatan gila yang tidak akan dilakukan penulis. Karena itulah penulis mendengarkan CD di atas. Ternyata Dewa Band hanya bernyanyi biasa-biasa saja. Penulis lebih kagum pada permainan musik dan olah instrument yang dibawakan mereka, daripada oleh lirik-lirik berbagai nyanyian yang dipersembahkan oleh band musik tersebut. Karena lagu-lagu tersebut memang produk musik dan bukanya produk sastra, maka hal itu sebenarnya adalah wajar-wajar saja. Bukankah lagu Natal yang dibawakan mendiang Jim Reeves laku dipasaran lebih dari lima puluh juta copy kaset, sebenarnya kuat dalam permainan musik dan bukannya dalam kata-kata? Karya Dhani Dewa dan kawan-kawannya inipun seperti itu juga, sehingga kita tidak 'terkecoh' hanya oleh liriknya yang digelar. Padahal apresiasi yang kuat juga harus diberkan atas musiknya secara keseluruhan dan tidak melulu karena liriknya. Namun, bagaimanapun juga telisik atas lirik-liriknya harus dilakukan, jika kita ingin tahu sebab sebenarnya dari 'serangan' terhadap lagu-lagu ciptaan mereka itu. Itulah kira-kira sikap yang sehat dan tidak berpihak, yang seharusnya diambil dalam kasus ini.

Ketika penulis kembali mendengarkan dengan teliti, barulah diketahui apa sebab Front Pembela Islam menjadi marah terhadap Dhani Dewa. Yaitu karena dalam lirik-liriknya, Dhani Dewa menunjuk kepada cinta yang kongkret kepada Tuhan, bukannya sekedar cinta konseptual yang sering dibawakan orang dalam lagu-lagu atau ceramah-ceramah mereka. Cinta konseptual yang dimaksudkan adalah cinta kepada Tuhannya orang Islam, yang dikenal dengan nama Allah SWT. Dalam pandangan ini Tuhan dianggap sebagai milik golongan mereka dan harus diperlakukan sebagai 'tokoh golongan' mereka, bukannya 'tokoh' yang secara umum dikenal oleh berbagai pihak sebagai Tuhan.

Bagi sementara orang, Tuhan yang begini ini sangat memuaskan karena 'mudah dikenal'. Namun bagi seorang seniman,Tuhan yang demikian itu adalah Tuhan yang memiliki keterbatasan karena dirumuskan sesuai dengan kemampuan manusia. Padahal, Tuhan jauh lebih berkuasa dari pada manusia manapun, sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an "Dia

berkuasa atas segala sesuatu" (*Huwa 'ala kuli shai'in qadir*). Jadi hanya Tuhan yang demikianlah yang patut disembah. Karena itu segala macam perbuatan manusia tidak dapat dikaitkan dengan Tuhan. Secara terus terang Dhani Dewa mengatakan "Atas nama cinta saja. Jangan bawa-bawa nama Tuhan demi kepentingan mu." Ini adalah kensekuensi logis dari manusia sudah diberi kekuatan oleh Tuhan. Namun hal semacam ini tidak diterima oleh mereka yang berpandangan lain itu.

Sebenarnya orang-orang yang menolak pandangan Dhani itu tidak memiliki argumentasi yang kuat. Karena itu mereka 'memperkuat' pandangan mereka dengan tindakan-tindakan fisik yang keras. Mereka mengira, dengan demikian akan tercapai keinginan mereka menghentikan 'kesalahan-kesalahan' yang diperbuat orang-orang seperti Dhani Dewa itu. Mereka tidak memahami kenyataan bahwa tindak kekerasan dan pengucilan fisik atas produk-produk yang dianggap salah itu tidak akan berbuah banyak. Karena generasi muda telah memiliki preferensi mereka sendiri, yang erat kaitannya dengan soal selera yang mereka senangi. Maka tindakan melarang nyanyian-nyanyian itu hanyalah tindakan ceroboh yang akan merusak kredibilitas lembaga yang melakukannya. Paling tinggi, ia hanya menjadi lembaga pelarangan seperti yang terjadi di masa pemerintahan Orde Baru beberapa tahun yang lalu.

Dalam sebuah masyarakat modern yang majemuk dan didasarkan pada pluralitas, soal selera diserahkan kepada perkembangan masyarakat itu sendiri. Karenanya, tidak akan mungkin diberlakukan sebuah larangan dalam bentuk apapun. Karena itu dapat dipahami mengapa disamping munculnya musik *Hard rock* dan Jazz disamping irama Klenengan dan Keroncong sebagai 'perwakilan' musik tradisional. Orang boleh saja menangisi munculnya sebuah jenis musik baru, tetapi selama musik lama dapat bertahan dipasaran, maka ia akan ada yang mendukung. Sedangkan sebuah 'tradisi baru' akan terus muncul sebagai perantara antara berbagai hal yang sudah ada, termasuk yang tadinya baru.

Mau tidak mau kita harus menjalani kenyataan 'tradisi' itu yang kemudian akan kita tinggalkan sebagai warisan, dan menjadi budaya campur aduk dengan segala kemodernannya. Dari situ, sebagian dari kita menemukan pola hidup yang mungkin membentuk kepribadiannnya -hal itu tidak usah disesali. Sebagian lainnya, mencoba melakukan jenis responsi apa yang ingin diberikan terhadap kebudayaan baru yang dianggap tidak dapat ditolaknya. Ini belum lagi jika kita masukan ke dalamnya akibat-akibat dari teknologi modern dan sebagainya. Karena itu dapat dimengerti jika manusia dalam sebuah budaya yang demikian, tampak tidak mampu mencari jalan keluar dan bertindak seolah-olah menjadi manusia yang binggung.

Sementara kaum muslimin dalam menghadapi keadaan seperti itu mempunyai dua pilihan, yaitu dari segi budaya atau institusional . Dari segi budaya, yaitu dengan melahirkan sikap budaya kolektif yang memancarkan 'ke-Islaman', seperti NU dan Muhammadiyah. Sebaliknya, pendekatan institusional lebih mementingkan tumbuhnya kemampuan Islam untuk 'mengalahkan' budaya-budaya lain. Kalau perlu memaksakan institusi Islam itu dengan kekerasan, seperti dengan melakukan dengan pengeboman di sejumlah tempat dan sebagainya. Responsi dengan menggunakan 'kekerasan' itu, tidak terbatas hanya dengan menggunakan alat-alat fisik saja tetapi juga ancaman dan gertakan,

seperti yang dialami Jemaat Ahmadiyah Indonesia, maupun oleh seniman seperti Dhani Dewa dan Inul Daratista.

Karena itu, kita harus berhati-hati untuk mengamati perkembangan kelompok-kelompok 'pemaksa' itu. Kita bukanlah negara Islam, karenanya kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar. Kita harus berani mempertahankan dengan segala cara yang sah menurut hukum Undang-Undang Dasar tersebut. Kalau ada orang yang menyatakan kita melanggar ketentuan-ketentuan Islam, dengan menggunakan contoh negara lain, kita harus berani menyatakan bahwa negara kita adalah Negara Nasionalistik, bukannya Negara Islam. Kenyataan ini harus ditekankan berulang kali. Sikap ini sebagai bagian dari sikap melestarikan atau merubah kehidupan kita secara sungguh-sungguh., bukan?

KEPERGIAN SETELAH MENGABDI

Seorang lagi dari deretan tokoh-tokoh kita telah meninggalkan lingkungan, setelah lama menderita sakit: Dr. Nurcholish Madjid.

Banyak sekali orang yang merasa kehilangan dengan kepergiannya pada usia 66 tahun itu. Padahal, itu adalah usia yang mencerminkan kematangan hidup, terlebih-lebih pada masa penuh kesalahpahaman dan salah pengertian satu sama lain, terkadang ”diwarnai” oleh ledakan bom dan lemparan granat.

Ada perbedaan faham yang fundamental antarsesama warga gerakan Islam dan hampir selalu berakhir pada hilangnya toleransi dalam kehidupan kita sebagai bangsa.

Nurcholish Madjid atau Cak Nur tetap konsisten dengan gaya hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Ia tetap mempergunakan cara-cara menolak pemakaian kekerasan. Ia dimaki-maki oleh begitu banyak orang, sehingga sangat lucu melihat bagaimana ia dimaki-maki dan diumpat-umpat untuk berbagai ”dosa” yang tidak pernah dilakukannya. Bahkan, setelah ia meninggal pun, masih ada orang yang menganggapnya ia melakukan hal-hal yang tidak pernah dikerjakannya selama hidup.

Cercaan dan umpatan seperti itu sudah menjadi hal yang biasa di telinganya sewaktu ia hidup. Bahkan, setelah meninggal, masih ada yang—karena kekerdilan jiwa—mengatakan secara lisan bahwa ia ”seharusnya sudah bertobat”. Padahal, yang seharusnya melakukan hal itu bukanlah Cak Nur, melainkan orang itu sendiri.

Bukankah kitab suci Al Quran memuat salah satu sifat yang mulia adalah kemampuan memberikan maaf kepada siapa pun untuk kesalahan apa pun. Di sinilah terletak kebesaran Cak Nur. Ia berhasil mendidik kaum Muslimin pada umumnya bahwa sifat yang seperti itulah yang harus dikembangkan terus dalam kehidupan mereka.

Apakah artinya ini? Artinya, bahwa kita semua harus mengikuti teladan yang diperlihatkannya itu. Bahwa hampir seluruh kaum Muslimin di negeri ini bersikap demikian, itu adalah bukti bahwa Cak Nur telah berhasil dengan pendidikannya itu. Ia yang lahir di Desa Mojoduwur, Kecamatan Bareng, di Jombang, Jawa Timur, itu akhirnya menjadi contoh bagi semua warga bangsa yang berjumlah lebih dari 210 juta jiwa itu (menurut hitungan Prof Dr Prijono Tjiptoherijanto)

Kita belum lagi berbicara tentang Islam sebagai bidang kajian, tempat Cak Nur menghabiskan umur. Sebagai ilmuwan, ia tidak mau berkompromi dengan politik sama sekali. Orang boleh berbicara di sinilah terletak kekuatan Cak Nur, atau sebaliknya menganggap itulah titik lemahnya.

Bagi penulis, hal itu tidak penting benar karena ia tidak menjadi besar atau kecil dalam hal ini. Ia akan tetap diakui sebagai salah satu pemegang otoritas studi keislaman (Islamic studies) di negeri kita.

Tentu saja ia punya sederet kesalahan karena ia adalah seorang anak manusia, tetapi kesalahan-kesalahan itu tidaklah memudarkan namanya (atau menurunkan nilai dirinya).

Ia adalah orang besar, karena ia memang demikian. Kini ia telah tiada, dan menjadi kewajiban kita untuk mengembangkan Nurcholish-Nurcholish baru. Hanya dengan cara demikian kita patut disebut pengikut Cak Nur di masa hidupnya.

Orang-orang lain, termasuk mereka dari ”garis kekerasan”, adalah orang yang ditinggalkan oleh perkembangan Islam, dan akan pudar dengan sendirinya ditelan masa.

SEBUAH KEPUTUSAN DAN AKIBATNYA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan pada tanggal 10 Agustus 2005, yaitu bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhak memberhentikan Prof. Alwi Shihab dari jabatannya dalam struktur PKB, dengan demikian gugatannya terhadap DPP PKB ditolak secara keseluruhan. Begitu juga diambil keputusan oleh sidang pengadilan itu, bahwa Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf tidak berhak menggunakan segala macam atribut partai, seperti lagu (Mars dan Hymne) PKB yang dalam keputusan ini adalah milik PKB yang diwakili oleh penulis dan Drs. A. Muhaimin Iskandar. Mereka berdua dan kawan-kawannya tidak berhak menggunakan segala macam atribut itu, dan dengan demikian secara efektif tidak dapat mewakili partai dalam kapasitas formal.

Keputusan itu dicapai dengan cara yang tidak menggunakan kekerasan sama sekali. Kedua belah pihak, baik pendukung penulis maupun pendukung Alwi Shihab diperkenankan berada dalam ruang keadilan. Dengan sangat sopan kedua belah pihak duduk tenang mengikuti jalannya sidang yang berkali-kali. Memang pada sidang terakhir Drs. Choirul Anam mengirimkan puluhan ‘anak buah’ untuk mengikuti sidang pengadilan, selain itu para warga PKB dari bermacam-macam daerah juga datang ke pengadilan, tapi kedua pihak itu tetap duduk dengan tenang dan teratur. Bahkan para warga Polri yang turut menjaga merasakan suasana yang tenang dan damai sepanjang masa sidang itu sendiri. Dengan senang DPP PKB akan menyambut baik keinginan mereka kembali sebagai warga PKB.. Inilah yang sebenarnya, apa yang terjadi dalam sidang hari terakhir itu, dan menunjukkan bahwa organisasi ‘sekolot’ PKB juga mampu menjaga ketertiban.

Salah satu ukuran bagi pertumbuhan dari demokrasi yang sehat, adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Hal ini jarang sekali dilakukan masyarakat kita, sehingga orang terheran-heran melihat proses peradilan yang berjalan dengan begitu mudahnya oleh organisasi yang dari dulu dianggap kolot/konservatif itu. Selama digambarkan bahwa orang yang tidak berpendidikan tinggi tidak mampu bergerak begitu teratur dan begitu baik. Inilah persepsi yang salah tentang lembaga-lembaga politik tersebut.

Dengan demikian terbukti bahwa pihak-pihak kolot maupun modern sebenarnya dapat bersikap teratur. Masalahnya hanya bagaimana mengatur agar kegiatan ‘bersama’ itu dapat berjalan mulus tanpa ribut-ribut. Sejarahlah yang akan membuktikan apakah ini dapat dilaksanakan juga di masa-masa datang. Jika dapat, berarti kita sudah tentu berhasil menengakkan sendi-sendi demokrasi.

Sudah tentu proses demokratisasi tidak dapat diukur hanya dengan sebuah ukuran saja, seperti kemampuan menjaga situasi agar tidak berkembang menjadi anarkis tadi. Banyak ukuran-ukuran lain yang perlu diterapkan oleh partai-partai politik, sebelum pada akhirnya kita menyatakan demokrasi sudah tegak di negeri kita, yang lebih penting justru adalah mengambil keputusan secara benar dan arif.

Perlakuan terhadap masyarakat ‘kolot’ itu, sama seperti pada waktu terjadi perluasan tanah-tanah pertanian di Amerika Serikat, akibat dari dilahirkannya sebuah Undang-Undang bernama “Homestead Act” . Menurut undang-undang itu, para petani memiliki tanah seluas apa yang ia dapat kerjakan. Peraturan itu lalu mendorong pemakaian traktor. Karena dengan traktornya, seorang petani dapat menanami tanah seluas belasan ribu hektar. Dengan demikian, lahirlah para petani yang memiliki tanah-tanah pertanian sangat luas. Meningkatnya jumlah petani itu dapat mengimbangi keinginan hijrah ke daerah-daerah perkotaan untuk bekerja di sektor industri.

Tidak cukup dengan itu saja, perkembangan pertanian itu juga didorong oleh jumlah kredit yang besar di bidang tersebut. Tanah-tanah pertanian yang luas dapat dijadikan agunan untuk memperoleh kredit pertanian yang berjumlah besar. Lahirlah ‘bank-bank pertanian’, seperti Bank of America, Kredit Anstalt di Jerman, Credit Lyonnaise di Prancis, Daiwa Bank di Jepang dan Rabo Bank di negara Belanda. Kesemua bank-bank pertanian itu sengaja memberikan pelayanan kredit pada para petani di desa-desa, sehingga mereka mampu mengembangkan kebolehan untuk digabungkan dengan adanya modal yang cukup. Di negeri kita, bank yang berfungsi seperti ini adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang sayangnya habis ‘diperas keuntungannya’ oleh korupsi. Karenanya faktor menghilangkan KKN, merupakan kebutuhan esensial bagi pertumbuhan bidang pertanian yang sehat.

Hal-hal lain, seperti penyebaran bibit yang baik dan penggunaan pupuk yang sehat, merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam bidang-bidang yang lain dari dunia pertanian. Kita harus terus menerus mengusahakan perbaikan tanpa henti-hentinya. Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Sebagai landasan pra-koperasi, baru tampak sehat atau tidaknya perkembangan pertanian. Karenanya, penambahan kemampuan petani menjadi kebutuhan esensial. Seperti yang dilakukan di India, dengan mendirikan industri pedesaan dengan komputerisasi, ratusan hektar tanah dapat melayani kebutuhan pokok masyarakat negara itu. Seorang birokrat pertanian, menceritakan bahwa kawasan pedesaan di sebuah tempat di India merupakan pusat pengembangan agribis yang paling terkemuka di dunia.

Dengan melakukan studi tentang berbagai aspek pertanian itu, perubahan-perubahan dapat didorong secara teratur dan berkala, sehingga ekonomi secara keseluruhan terdorong untuk maju. Selain itu, diperlukan kemampuan berkomunikasi yang praktis untuk menjelaskan perlunya dilakukan perbaikan-perbaikan itu. Kalau sudah demikian, hambatan-hambatan yang sering membuat orang ragu dengan sesuatu yang baru akan hilang dengan sendirinya.

Peningkatan pertanian dengan bepegang kepada kemajuan-kemajuan teknologi, perhubungan, marketing/pemasaran dan sebagainya, haruslah diketahui oleh para petani untuk mencapai hasil yang diinginkan. Inilah yang sering diabaikan oleh para pengambil kebijakan di bidang pertanian. Kenyataan yang terlihat yaitu adanya perbaikan sangat besar di bidang teknologi pertanian, seperti penggunaan traktor untuk menanam dan menuai atau panen, tetapi tidak dipikirkan bagaimana caranya menyelenggarakan transportasi murah untuk dan cepat 'meleparkan' produk-produk pertanian hasil perbaikan teknologi itu.

Apa yang seharusnya dilakukan di bidang pertanian, juga memerlukan perhatian kita juga di bidang-bidang lainnya. Di bidang penyelenggaraan birokrasi pemerintahan, umpamanya kita memerlukan kemampuan untuk merubah keadaan secara fundamental. Dengan cara hanya menghukum mereka yang melakukan kesalahan administratif yang besar, begitu juga yang melakukan korupsi secara *massif*. Kita tidak boleh menghukum mereka yang melakukan kesalahan kecil atau melakukan korupsi 'kecil-kecilan' akibat kemiskinan. Dari kearifan seperti ini, kita akan dapat membenahi birokrasi pemerintahan itu sendiri tanpa merusaknya secara individual. Inilah yang seharusnya kita ingat selalu, perbaikan harus dilakukan tanpa terlalu banyak kesalahan yang mungkin akan merusak birokrasi itu sendiri.

Dalam hal ini, pedoman yang harus diambil adalah kehati-hatian. Perbaikan yang dilakukan haruslah selalu memperhitungkan akibat-akibat negatifnya yang dapat terjadi di masa depan. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan fundamental yang dilakukan Mao Zedong di RRT (Republik Rakyat Tiongkok) tahun 1949. Sekitar Duabelas juta orang kaum petani kaya maupun birokrat, Mao menghadiahi mereka hukuman mati melalui proses 'pengadilan rakyat'. Akibatnya, sangat dramatis, hampir-hampir menghancurkan birokrasi pemerintahan. Tidak disadari bahwa hal itu dapat menghancurkan birokrasi pemerintahan. Sebagai sebuah sistem, hal itu adalah bagian dari proses melestarikan dan membuang yang biasa terjadi dalam sejarah manusia, bukan?

KEBENARAN' DAN PENOLAKAN ATASNYA

Pada suatu ketika, penulis dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang terus menerus 'mengganjal' hubungan mesra antara dirinya dengan orang beragama lain. Pertanyaan itu adalah: apakah batas dan hubungan antara kebenaran sebuah keyakinan dengan pergaulan antara sesama penganut agama dalam konteks negara Republik Indonesia? Pertanyaan ini haruslah memperoleh jawaban yang jujur, karena sendi-sendi kenegaraan kita sangat tergantung kepada jawaban itu.

Jika kita menggunakan 'kerangka penuh' sebagai seorang muslim saja, kita akan menjawab: persetan dengan semua hubungan antara diri kita sendiri dengan para penganut agama-agama lainnya. Kita hanya akan melihat pentingnya pencapaian hubungan dalam pola 'sempit', yaitu antara seorang muslim dan akidahnya. Sikap sebagai seorang muslim, lalu menjadi sangat arogan dalam negara kita hidup. Akhirnya, kita hanya mau tahu kebenaran agama sendiri, dan menjadi puas ketika 'mengalahkan' agama lain.

Arogansi seperti inilah yang menjadikan kita berstandar ganda dalam bernegara. Di satu pihak, kita memerlukan negara untuk tetap hidup. Di pihak lain, kita acuh tak acuh terhadap eksistensi/wujud negara ini. Padahal, salah satu cara untuk mempertahankannya adalah memahami watak kemajemukan hidup beragama di negeri itu, yaitu dengan bersikap toleransi/tenggang rasa antara sesama agama yang hidup di negara tersebut. Karenanya, pluralisme yang ditolak oleh Munas ke-7 Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini, justru memperlihatkan adanya sikap yang tidak mau tahu dengan toleransi, yang sebenarnya menjadi inti dari kehidupan beragama yang serba majemuk dalam kehidupan negara kita.

Sebagai pemimpin formal Rebuplik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam percakapan dengan penulis baru-baru ini bertanya: "Kalau saya mengambil sikap hanya berpegang pada ajaran Islam yang 'resmi', bukankah saya akan dipersalahkan jika hadir dalam sebuah peringatan Hari Natal? Bukankah lalu saya harus mau menghapus tradisi baik yang sudah berjalan puluhan tahun? Dan bukankah saya lalu menyalahkan sikap para Presiden setelah kita merdeka, yang selalu hadir dalam acara-acara seperti itu? Bukankah dari dulu hingga sekarang, saya tidak mengikuti acara peribadatan Kristen?" Penulis tidak menjawab deretan pertanyaan tersebut, karena jawaban kekanak-kanakan akan merusak tradisi sangat baik yang dihadirkan oleh hubungan mesra antara sesama agama yang hidup di negeri kita. Jawabannya sudah jelas, tidak perlu penulis ulangi di sini.

Bahkan baru-baru ini Presiden Bush dari Amerika Serikat, menghadiri perayaan yang dilakukan kaum muslimin di negaranya. Bukankah ini kebalikan dari negara kita? Sesuatu yang justru harus diabadikan di negara kita, malah dijauhi dengan keputusan yang dangkal oleh sebuah forum semulia Munas MUI. Seharusnya 'tradisi baik' ini dikembangkan lebih jauh tanpa harus melemahkan akidah kita sendiri. Penulis yakin bahwa sikapnya untuk hadir dalam berbagai upacara keagamaan oleh agama-agama yang berlainan, tidak akan 'mematahkan' keyakinannya sendiri sebagai seorang muslim.

Di sinilah terletak saripati sikap beragama yang benar, seperti saat kita melaksanakan firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'an "Mudah-mudahan kedamaian menyertainya, di hari kelahirannya" (*salamun'alayhi yauma mulida).* Siapapun juga akan tahu, ayat suci tersebut ditujukan kepada Nabi Isa AS, terlepas dari kenyataan bahwa ia dinyatakan sebagai 'Anak Tuhan' atau bahkan Tuhan oleh orang-orang Kristen jauh sebelum Islam sendiri lahir di dunia ini. Keyakinan bahwa Nabi Isa adalah 'Anak Tuhan' atau Tuhan, bukanlah urusan kita. Justru sikap untuk memaksakan tafsiran sepihak akan hakikat diri tokoh tersebut, akan meracuni hubungan mesra antara kaum muslimin dan kaum nasrani. Penghargaan kepada kaum non-muslim oleh kaum muslimin, tidak berarti menunjukkan kita telah meninggalkan akidah kita sendiri, melainkan justru menunjukkan kedewasaan pandangan kita di mata mereka. Kenyataan sekecil ini saja, menunjukkan bahwa pandangan 'terlalu formal' tanpa memperhatikan perasaan orang lain, adalah sikap kekanak-kanakan yang perlu dikikis habis.

Harus diakui umat Islam terbagi menjadi dua dalam bersikap terhadap agama lain. Jika pimpinan MUI tetap 'terbuai' oleh sikap 'harus' menyatakan kebenaran sendiri, maka kaum muslimin akan terjebak dalam formalisasi sikap yang tidak dikehendaki. Itulah sebabnya, mengapa para pendiri Republik Indonesia berkeras mengatakan bahwa negara ini bukanlah sebuah negara agama. Lalu apakah para pemimpin Islam waktu itu seperti: Ki Bagus Hadikusumo dan KH. Kahar Muzakir dari Muhammadiyah, AbikusnoTjokrosuyoso dari Serikat Islam, Achmad Subarjo dari Masyumi, AR. Baswedan dari Partai Arab Indonesia, KH. Wahid Hasjim dari Nahdlatul Ulama dan H. Agus Salim, adalah tokoh-tokoh gadungan yang tidak mewakili golongan Islam?

Jelaslah, kaum muslim pendiri Indonesia berpandangan luas mengenai hubungan timbal balik dengan para pengikut dan pimpinan agama-agama lain. Selama lebih dari empat dasawarsa, kita hidup dalam tradisi saling menghormati. Mengapakah kita lalu harus meninggalkan sikap tersebut, padahal tidak ada keharusan untuk melakukannya? Bukankah sikap apriori, yang dalam hal ini tidak mau mengakui kehadiran agama-agama lain dalam kehidupan bernegara kita, adalah buah dari 'kesombongan'? Mengapakah kita harus menerima 'pandangan kaku' seperti itu, yang dimulai oleh segelintir orang yang 'menggunakan' MUI secara tidak wajar? Bukankah itu adalah sikap tergesa-gesa dari mereka yang menggangap diri sendiri sebagai pihak paling berhak menafsirkan 'kebenaran' ajaran Islam?

Sebuah sikap untuk 'mencuri-curi' ajaran Islam dari lingkupnya yang sehat, menunjukkan sikap arogan yang harus ditentang habis. Tindakan 'sembunyi-sembunyi' itu dilakukan untuk mempertahankan sebuah versi kebenaran, karena belum tentu dimaui oleh mayoritas bangsa. Siapapun orangnya dan darimana pun asalnya, tidak lagi menjadi penting bagi kitas semua.Penulis sendiri yakin, jika hal itu dibuat dalam sebuah referendum, mayoritas kaum muslimin akan menolaknya. Di sinilah kita memerlukan demokrasi dalam artian sebenarnya, dalam kehidupan kelompok besar seperti bangsa kita.

Pernyataan Din Syamsuddin dalam siaran radio niaga *Elshinta*, minggu lalu, bahwa ia akan mencoba melerai/menjembatani perbedaan antara yang menyetujui dan menolak

‘fatwa’ MUI itu, adalah sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Sebab arogansi yang sudah diperlihatkan MUI telah menyadarkan kita, agar tidak mudah ‘tertipu’ terhadap sikap yang seolah-olah mewakili umat Islam.

Sebenarnya, dari peristiwa-peristiwa itu hanya ingin menunjukkan bahwa telah terjadi sebuah proses lain yang tidak kalah penting, yaitu proses melestarikan dan membuang, yang sering terjadi dalam sejarah umat manusia, bukan?

LAIN JAMAN, LAIN PENDEKATAN

Persoalan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih terus dibicarakan orang. Walaupun KH. M. Sahal Mahfudz telah berusaha sekuat-kuatnya menjelaskan, namun tidak berhasil menenangkan masyarakat, bahkan MUI-pun menjadi sasaran guyonan masyarakat banyak. Bahkan ada yang menyatakan, MUI adalah singkatan Majelis Uang Indonesia. Contoh plesetan yang tidak menggelikan ini, sebenarnya menggambarkan perasaan masyarakat yang berang terhadap 'kesalahan' MUI. Bahkan sikap salah seorang ketuanya yaitu KH. Ma'ruf Amin yang menyatakan ia optimis Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mendukung MUI dalam hubungan dengan melarang gerakan Ahmadiyah Indonesia, dirasakan sebagai sikap arogan dan tidak bertanggung jawab.

Bukan hanya penulis, yang melihat masalahnya dari sudut konstitusi, tapi orang-orang seperti Dr. Azyumardi Azra, Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif (yang disegani orang karena sikapnya yang hati-hati), dan Dr. M. Syafi'i Anwar, semuanya menolak fatwa MUI itu. Bahkan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada di lingkungan MUI dihadapkan kepada reaksi marah dari para anggota Muhammadiyah sendiri, termasuk ketuanya Din Syamsuddin. Bahkan seorang tokoh Muhammadiyah yang berpengaruh besar seperti Prof. M Dawam Rahardjo berpendapat, menuntut supaya MUI dibubarkan saja. Kira-kira menurut pendapat penulis, karena sikap MUI terhadap minoritas seperti GAI (Gerakan Ahmadiyah Indonesia). Tokoh-tokoh yang disebutkan di atas, memahami benar bahwa GAI dilindungi oleh konstitusi kita, betapapun kita berbeda pendirian dengan mereka.

Sedangkan argumentasi orang-orang yang tergabung dalam usaha pelarangan atau yang mendukung argumentasi untuk melarang GAI itu, adalah bahwa Saudi Arabia melarangnya. Namun dilupakan Saudi Arabia adalah sebuah negara Islam, sedangkan Republik Indonesia bukan. Kita adalah sebuah negara nasional yang berlandaskan Pancasila, karena itu dapat menerima perbedaan apapun dalam faham kenegaraan (kecuali komunisme dalam pandangan sejumlah orang). Jika kita larang GAI, karena berbeda dari pendapat doktriner sebagian besar kaum muslimin di negeri ini, konsekuensinya kita juga harus melarang pandangan-pandangan kaum Kristen dan Katholik, Buddha, Hindu dan lain-lain. Bukankah keyakinan mereka juga tidak sama dengan keyakinan keimanan mayoritas kaum muslimin?

Maka dapat dipahami 'kemarahan' orang terhadap fatwa MUI itu. Karena bukannya menolong pemerintah untuk mencarikan jawaban terhadap keadaan yang 'mengharuskan' pencarian solusi bagi krisis multidimensi yang sedang kita hadapi, atau setidak-tidaknya menahan diri dari setiap tindakan yang memperburuk hubungan antara kita, fatwa MUI itu justru membawa masalah baru dalam hubungan antara berbagai agama di negeri kita.

Pandangan serba sempit yang dimiliki MUI itu akan merugikan seluruh komponen bangsa.

Kita harus saling mengingatkan, bahwa kita memiliki kewajiban agar apapun perbedaan pendirian kita, kita harus hidup bersama dalam satu ikatan. Bahwa perbedaan demi perbedaan yang ada, seharusnya mendorong munculnya sikap yang arif bijaksana, bukannya sikap yang membuat hubungan yang ada menjadi semakin buruk, seperti pendapat MUI yang menimbulkan reaksi yang begitu keras.

Memang pada akhir-akhir ini kita melihat bahwa di lingkungan gerakan-gerakan Islam mulai muncul 'hal-hal tidak sedap', seperti munculnya sikap lebih keras di kalangan kaum muslimin, untuk memunculkan 'kelebihan' ajaran-ajaran agama Islam di atas berbagai ajaran agama-agama lain. Sebenarnya unutk memenuhi 'kebutuhan' akan hal itu, justru diperlukan kearifan untuk menahan diri di kalangan para pemimpin Islam sendiri.

'Salah baca' para pimpinan MUI justru berakibat pada reaksi berlebihan dari kaum muslimin sendiri. Kalau saja hal ini disadari oleh para pemimpin MUI, tidak akan terjadi apa yang kita saksikan minggu lalu itu, yaitu penyerangan sejumlah Masjid Ahmadiyah. Para pemimpin MUI justru melupakan sebuah kenyataan penting berupa rumusan ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu "Telah Ku-ciptakan kalian sebagai lelaki dan perempuan, dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa, untuk saling mengenal" (*I nna khalaqnakum min dzakarin wa untsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu).* Dan sikap dasar dari ketentuan Tuhan itu adalah "Dan berpeganglah kepada tali Allah secara keseluruhan, dan jangan terpecah-belah" (*wa'tashimu bi habli Allah jami'an wa la tafarraqu)*.

Sikap dasar ini juga merupakan antisipasi terhadap kenyataan akan masa depan agama Islam dan kaum muslimin, seperti telah terbukti dewasa ini yaitu Islam merupakan agama besar, tanpa mengecilkan agama-agama lain. Inilah yang belum disadari oleh para pemimpin MUI maupun para pemimpin berhaluan keras yang ada di kalangan kaum muslimin sendiri pada saat ini. Sikap-sikap keras yang kita lihat masih ada di kalangan kaum muslimin mudah-mudahan akan hilang melalui pendidikan yang lebih baik dan komunikasi yang lebih *intens*.

Bisa kita gambarkan upaya para pemimpin muslim di masa lampau, seperti Sir Sayyed Ahmad Khan di India dan Mohammad Abduh di Mesir. Di masa lampau, mayoritas kaum muslimin pada waktu itu bersikap keras pada orang lain, karena memang kolonialisme masih merajalela. Karena itu sikap toleransi yang mereka perlihatkan dianggap sebagai tindakan 'menyerahkan diri' kepada agama lain. Tetapi pendidikan dan komunikasi yang berkembang antara kaum muslimin dan pihak-pihak lain, membuat kita menyadari bahwa memang diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dalam hal ini.

Hanya saja di kalangan orang-orang yang berpengetahuan agama Islam tidak cukup mendalam, justru terjadi kecurigaan yang berlebih-lebihan terhadap orang lain, yang menonjolkan perbedaan-perbedaan yang ada, bukannya mencari titik temu antara Islam

dengan agama-agama lain itu. Karena itulah, timbullah reaksi yang mengacu kepada penggunaan "bahasa kekerasan" dari Islam terhadap agama-agama lain. Inilah sisa-sisa warisan lama yang harus kita rubah melalui pendidikan dan komunikasi antar golongan. Ini berarti terhadap keadaan yang berubah, respon kita juga harus mengalami perubahan pula. Perubahan respon ini adalah kewajaran dalam perkembangan manusia, bukannya keadaan yang harus diteruskan dari generasi ke generasi. Tanpa memahami "keharusan sejarah" ini maka dapat berakibat fatal bagi diri kita sendiri, minimal bagi peranan kita dalam kehidupan bersama. Jawaban yang tepat hanya diperoleh mereka yang memahami keadaan secara tepat pula.

Apa yang dikemukakan di atas hanyalah sebagian saja dari begitu banyak hal-hal rumit yang dihadapi oleh kaum muslimin. Tetapi merespon dengan sikap keras merupakan sesuatu yang tampak dengan segera dalam pandangan bangsa ini. Mengapa? Karena kaum muslimin tidak hidup sendirian di sini, melainkan ditakdirkan oleh Allah untuk hidup bersama-sama dengan orang-orang beragama lain. Bahkan kaum muslimin sekarang ini harus hidup dengan mereka yang tidak ber-Tuhan, atau mereka yang memiliki kerangka etis yang lain, seperti kerangka dari 'masa lampau'. Ini adalah bagian dari upaya melestarikan dan membuang yang senantiasa terdapat dalam proses sejarah umat manusia, bukan?

KEKUASAAN DAN HUKUM

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu yang lalu, seperti memberi sinyal bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki wewenang untuk membubarkan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kalau pendapat ini dikemukakan orang lain, tidak ada masalah sama sekali. Tetapi ia dinyatakan oleh SBY dalam kapasitas pemimpin formal negeri ini. Padahal ia sebenarnya seharusnya sudah tahu bahwa wewenang itu harus berada di tangan Mahkamah Agung (MA). Katakanlah keputusan MUI tentang JAI itu, yang sudah diambil sejak lama, memiliki nilai 'kebenaran' dan karenanya harus dilaksanakan. Tapi *toh* yang terjadi hanyalah 'kebenaran' dalam pendapat keagamaan bukan pendapat kenegaraan. Dalam hal ini, jika kita benar-benar konsekuen dengan Undang-Undang Dasar (UUD), fatwa MUI itu bukanlah pendapat negara .

Jika ada yang menyatakan, bahwa MA menganggap tidak perlu memberikan fatwa dalam hal ini, maka tulisan ini hendaklah dianggap sebagai permintaan fatwa tersebut. Karena MA memiliki wewenang untuk intervensi/campur tangan dalam hal kenegaraan apapun, yang menyangkut UUD. Tanpa memiliki keberanian moral untuk berpegang pada kenyataan ini, berarti MA mengingkari kehadirannya sendiri, sesuatu yang sebenarnya menyimpang dari perjalanan bangsa ini ke arah demokrasi konstitusional. Kalau kita sudah tidak mempunyai anggapan seperti ini, itulah sebenarnya yang menjadi persoalan. Karena keseluruhan bangunan negara kita didasarkan pada asumsi dasar, bahwa kekuasaan negara pada tingkat nasional memiliki tiga unsur utama: pelaksana (eksekutif), pembuat aturan (legislatif), dan penjaga (yudikatif).

Kalau 'pembagian kekuasaan' seperti itu dalam kehidupan bernegara tidak diperhatikan, maka alasan berdirinya bangsa ini (*raison d'etre du nation*) berhenti beroperasi dalam kehidupan kita. Berarti kita harus merumuskan kembali dasar-dasar negara kita. Pancasila yang sudah dirongrong begitu rupa, sekarang justru dirongrong dari dalam sendiri. Kalau memang demikian, apa yang diinginkan 'orang luar' yaitu pisahnya Indonesia menjadi tujuh atau delapan negara segera menjadi kenyataan. Alangkah menyedihkan jika globalisasi sebagai proses, akan dapat benar-benar berfungsi mencabik-cabik kohesi kita. Padahal globalisasi itu memiliki juga potensi lain terhadap kita sebagai bangsa yang sangat heterogen (memiliki kemajemukan sangat tinggi) dalam hampir semua hal, yaitu dapat diarahkan ke arah penyatuan perasaan maupun pendapat-pendapat yang pokok.

Dalam pertemuan syukuran untuk menghormati kesembuhan penulis pada tanggal 27 Juli 2005 yang lalu, oleh teman-teman, penulis diminta untuk memimpin sebuah paguyuban yang bertugas untuk mencari 'penyelesaian' atas berbagai hal yang dihadapi bangsa ini. Akibat dari langkanya kepemimpinan yang meliputi seluruh bangsa, dari yang bersifat moral hingga yang bersifat hukum. Kelangkaan itu dikemukakan sebagai penyebab dari amburadulnya kehidupan bangsa. Dari beberapa jam mengeluarkan pendapat, para hadirin dalam 'sidang' syukuran itu menyatakan perlunya kita kembali 'meluruskan' konsep-konsep kepemimpinan yang kita gunakan dewasa ini. Bahkan ada yang bersikap sangat jauh dan sangat ekstrim, dengan menganggap seolah-olah kita tidak memiliki

kepemimpinan sama sekali untuk membawa bangsa ini ke arah yang kita cita-citakan.Yang ada hanyalah kepemimpinan negara, tanpa memiliki arah nasional berupa kehidupan bangsa yang kita dambakan.

Kalau bangsa Indonesia hanya mengandalkan kepemimpinan formal negara, kita akan segera tercabik-cabik menjadi sekian negara. Kalau ini dibiarkan jalan terus, bukankah 'kematian' kita sebagai bangsa sudah tampak dengan jelas dan gamblang dalam cakrawala kita sebagai bangsa? Untuk itulah, kita harus mencoba 'mencari' kembali hal-hal yang mendorong kejayaan kita di masa lampau, dengan mempertaruhkan segala-galanya bagi berdirinya sebuah bangsa? Dan bangsa itulah yang kemudian membentuk negara Republik Indonesia. Latar belakang inilah yang sebenarnya merupakan basis bagi kuatnya pendapat yang menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia.

"Kenyataan historis" seperti inilah yang sudah banyak dilupakan orang. Nah, dalam hal ini kita perlu melihat kembali apa yang menjadi dasar dari pendapat seperti itu. Ternyata, hal itu dapat diketemukan dalam pemisahan yang tegas antara kekuasaan dari hukum. Bahwa, negara kita tidak berdasarkan pada kekuasaan, melainkan sebuah negara hukum yang bersandar kepada sebuah Undang-Undang Dasar, yang lengkap dengan pembukaan dan penjelasannya. Karenanya, yang berhak menentukan pelanggaran terhadap UUD hanyalah satu pihak saja, yaitu MA, lainnya tidak memiliki kompetensi dan wewenang sama sekali. Segala macam pendapat dan analisa, dapat disampaikan kepada lembaga itu, tetapi MA adalah satu-satunya pihak yang dapat melakukan hal itu. Inilah yang harus senantiasa diingat oleh semua pihak, tanpa kecuali.

Sayangnya MA sendiri tidak begitu aktif membela hak tersebut. Bahkan ada tanda-tanda MA "melalaikan kewajiban" dalam hal ini. Seperti saat Kapolri Da'i Bachtiar di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri menyatakan, para mahasiswa yang melakukan demo dihadapan rumah Megawati Soekarnoputri di jalan Teuku Umar melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Penulis segera mengeluarkan reaksi yang tidak dimuat sama sekali oleh pers nasional kita. Penulis bertanya siapakah yang seharusnya berhak mengeluarkan pendapat hukum dalam hal ini? MA atau Polri? menurut pendapat penulis, hanya MA yang memiliki wewenang hukum yang "harus diikuti" dalam hal ini. Polri hanya berwewenang melaksanakan saja keputusan MA, seperti halnya dengan MUI, pemimpin negara dan lain-lain. Kita tidak menginginkan MUI menjadi badan kenegaraan dan Menteri Agama berfungsi hukum untuk menggantikan MA.

Kalau kita ingin merubah hal ini, hendaknya diadakan forum konvensi untuk itu. Tindakan apapun, yang diambil secara sepihak, tentu saja bersifat "gelap" dan tidak memiliki dasar hukum. Hal yang sangat menyedihkan ini dapat terjadi dalam kehidupan kita, jika kita tidak berhati-hati. Kemalasan kita sebagai bangsa, akan berbuntut sangat panjang bagi sejarah kita. Tentu saja tidak ingin demikian.

Apa yang diuraikan diatas adalah sebuah penalaran yang bersifat umum dalam kehidupan bangsa kita. Ini adalah pendapat pribadi yang hanya lebih tepat dibantah, daripada dianggap sebagai "kejahatan" terhadap Islam. Karenanya pendapat itu tidak perlu ditanggapi secara emosional, melainkan harus dengan cara rasional. Lagi pula yang kita

persoalkan bukanlah ajaran Islam, melainkan bagaimana sebuah ajaran agama harus diterapkan dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Ini adalah bagian dari proses melestarikan dan membuang sesuatu dalam kehidupan sejarah kita sebagai bangsa, bukan?

DAFTAR PUSTAKA

1.www.gusdur.net.

2. (*Seputar Indonesia*, Jum'at, 15 Agustus 2008)

3. Majalah tokoh Indonesiah